



LAPORAN TEKNIS

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna, dan Perairan Sekitarnya Tahun 2025

Oleh

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Dahlia G. R. Menufandu,
Arnoldus S. Ananta, Marthinus J. Rumere, Trigarcia M. Randa, Elfira
Suawa, Kezia E. Salosso, dan Jeniffer A. Maleke



Laporan Teknis

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat
Di Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni,
Kaimana, Teluk Etna dan Perairan Sekitarnya
Tahun 2025

Oleh

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Dahlia G.R Menufandu, Arnoldus S. Ananta, Marthinus J. Rumere,
Trigarcia Randa, Elfira Suawa, Kezia E. Salosso, Jeniffer A. Maleke

Laporan Teknis

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan Perairan Sekitarnya Tahun 2025

Penulis

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Dahlia G.R Menufandu, Arnoldus S. Ananta, Marthinus J. Rumere, Trigarcia Randa, Elfira K. Suawa, Kezia E. Salosso, Jeniffer A. Maleke.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Universitas Papua

Saran Sitasi

Pakiding, F., D. Matualage, D.G.R. Menufandu, A.S. Ananta, M.J. Rumere, T. Randa, E.K. Suawa, K.E. Salosso, J.A. Maleke. 2026. Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan Perairan Sekitarnya Tahun 2025 (*Laporan Teknis*). Program Sains untuk Konservasi LPPM Universitas Papua, Manokwari.

Foto Sampul: Habema Monim (Program Sains untuk Konservasi, LPPM UNIPA)

Desain dan Tata Letak: Arnoldus S.Ananta/Program Sains untuk Konservasi, LPPM UNIPA

PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai kontribusi terhadap upaya penguatan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan Perairan Sekitarnya (ditulis sebagai KKP Kaimana di laporan ini), melalui penyediaan data dan informasi sosial ekonomi yang berbasis pemantauan langsung di lapangan. Laporan ini memuat temuan penting terkait kondisi demografi, mata pencaharian, ketahanan pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut, persepsi terhadap perubahan iklim dan cuaca, serta pengetahuan tentang Kawasan Konservasi.

Sejak penetapan kawasan konservasi, pemantauan sosial ekonomi dilakukan secara berkala untuk menilai perubahan kondisi masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga dan pemanfaatan sumber daya laut. Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah KKP Kaimana masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya alam, khususnya melalui kegiatan pertanian dan perikanan sebagai sumber utama penghidupan. Di sisi lain, berbagai tantangan juga masih dihadapi, antara lain keterbatasan akses pasar, penurunan kepemilikan aset rumah tangga, serta meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim dan kondisi cuaca yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Laporan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterikatan yang kuat terhadap lingkungan laut serta masih mempertahankan sistem pengelolaan tradisional seperti petuanan atau hak ulayat dalam pengaturan wilayah perairan. Selain itu, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kawasan konservasi dan aturan penangkapan ikan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yang sebagian didukung oleh kegiatan sosialisasi dan pendampingan dari pengelola kawasan serta mitra konservasi.

Laporan ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kaimana, Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Teknis Daerah (BLUD UPTD) Kaimana-Fakfak, dan instansi terkait lainnya, dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan kawasan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Temuan dan analisis yang disampaikan diharapkan pula dapat memperkuat basis data sosial ekonomi dalam kerangka perencanaan dan evaluasi pengelolaan konservasi ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat di kampung-kampung wilayah KKP Kaimana yang telah berkontribusi dalam proses survei ini, serta kepada para mitra yang turut mendukung pelaksanaan pemantauan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem laut di KKP yang penting ini.

Manokwari, Januari 2026

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan sosial ekonomi di KKP Kaimana tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini BLUD UPTD KKP Kaimana-Fakfak atas dukungan kelembagaan yang sangat berarti dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Kami juga berterima kasih kepada Universitas Papua, khususnya kepada Rektor (Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Prof. Dr. Ir. Freddy Pattiselano, M.Sc), dan Tim Lapangan (Agustinus Aiwor, Alfian Samberi, Diva Girsang, Jackson Bundah, Kristina Rahail, Armandho Rumpaidus, Rivaldo Heipon).

Kami menghargai dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana, serta Pemerintah Distrik di wilayah tersebut yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di tingkat lokal.

Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada Pemerintah Kampung dan seluruh masyarakat kampung atas sambutan hangat dan partisipasi aktif selama proses pengumpulan data di kampung-kampung: Adijaya, Bamana, Boiya, Kamaka, Kambala, Lobo, Lumira, Mai Mai, Marsi, Murano, Namatota, Nariki, Nusa Ulan, dan Rurumo.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Konservasi Alam Nusantara sebagai administrator pendanaan bagi pelaksanaan Program Pemantauan Sosial Ekonomi di Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung tahun 2025. Dukungan ini memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang mendalam dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat.

DAFTAR ISI

BAGIAN I PENDAHULUAN	1
BAGIAN II STATUS DAN TREN	4
Status dan Tren: Karakteristik Demografi	5
Populasi Umur dan Jenis Kelamin	5
Kepala Rumah Tangga	6
Partisipasi Sekolah	7
Agama	8
Suku	9
Status dan Tren: Indikator Sosial	10
Ketahanan Pangan Rumah Tangga	10
Ketahanan Pangan Anak	12
Hari Sakit atau Cedera	13
Pemberdayaan Politik: Hak Kepemilikan Laut	14
Budaya: Keterikatan Tempat	16
Status dan Tren: Karakteristik Ekonomi	17
Pekerjaan Utama	17
Aset Rumah Tangga	19
Status dan Tren: Penggunaan Sumberdaya Laut	20
Frekuensi Melaut	20
Penghasilan Penangkapan Ikan	22
Teknik Penangkapan Ikan	25
Status: Iklim dan Cuaca	27
Status: Kesadaran akan Peraturan Pelestarian Laut	28
Pengenal Istilah Kawasan Konservasi	28
Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan	29
Pendapat tentang Pengertian Kawasan Konservasi	30
Pendapat tentang Penangkapan Ikan di KKP	31
Letak Kampung di KKP	32
BAGIAN III REKOMENDASI KEBIJAKAN	33
DAFTAR PUSTAKA	36

Bagian I

Pendahuluan



Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan perairan sekitarnya merupakan salah satu kawasan konservasi laut prioritas di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Terletak di bagian selatan Bentang Laut Kepala Burung (Bird's Head Seascape/BHS), KKP Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan perairan sekitarnya memiliki total luas wilayah perairan masing-masing sebesar 232.062,54 hektar (Buruway), 35.475,86 hektar (Arguni), 121.742,41 hektar (Kaimana), dan 110.523,32 hektar (Teluk Etna) dengan ekosistem laut yang sangat kaya dan beragam. Kaimana dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, dengan habitat penting berupa terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove (Veron et al., 2009, Allen & Erdmann, (2009, 2012). Berbagai ekosistem ini berperan penting sebagai tempat pemijahan, pembesaran, dan perlindungan bagi spesies laut, termasuk spesies endemik dan bernilai ekonomi tinggi yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat pesisir (Mangubhai et al., 2012).

Penetapan kawasan ini sebagai KKP dilakukan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk memenuhi target konservasi laut sebesar 10% dari total perairan nasional (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2019). Tujuan utama pengelolaan kawasan adalah menjaga kelestarian ekosistem laut, mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Untuk itu, sistem zonasi telah dikembangkan, yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, serta zona lainnya, guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, KKP Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan perairan sekitarnya dikelola secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah melalui BLUD UPTD KKP Kaimana-Fakfak, bersama masyarakat adat dan berbagai mitra konservasi. Kendati demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, tekanan akibat pembangunan wilayah, serta keterbatasan kapasitas patroli dan pengawasan. Sejak tahun 2012, Universitas Papua (UNIPA) telah melaksanakan program pemantauan sosial ekonomi secara berkala melalui survei awal (*baseline survey*) dan monitoring berulang hingga tahun 2025. Pemantauan ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak penetapan kawasan konservasi terhadap kesejahteraan masyarakat serta untuk mendokumentasikan perubahan sosial ekonomi dari waktu ke waktu (Glew et al., 2012).

Pemantauan tahun 2025 dilaksanakan di 14 kampung yang berada di wilayah KKP Buruway, Arguni, Kaimana, Teluk Etna dan perairan sekitarnya. Survei ini mencakup berbagai aspek, termasuk karakteristik demografi, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, struktur mata pencaharian, kepemilikan aset rumah tangga, penggunaan sumber daya laut, serta persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim dan pengelolaan kawasan konservasi.

Laporan teknis ini menyajikan hasil analisis status dan tren kondisi sosial ekonomi di wilayah KKP Kaimana berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025 serta perbandingan dengan data pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya. Temuan yang disajikan diharapkan dapat

memberikan masukan bagi pemerintah daerah, pengelola kawasan, serta mitra konservasi dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan kawasan konservasi yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.



Proses penjemuran kelapa secara alami di Kampung Adijaya. Komoditas kopra tetap menjadi produk unggulan yang menopang stabilitas ekonomi rumah tangga di wilayah KKP Kaimana. (Foto: Arnoldus Ananta/LPPM UNIPA)

Bagian II

Status dan Tren

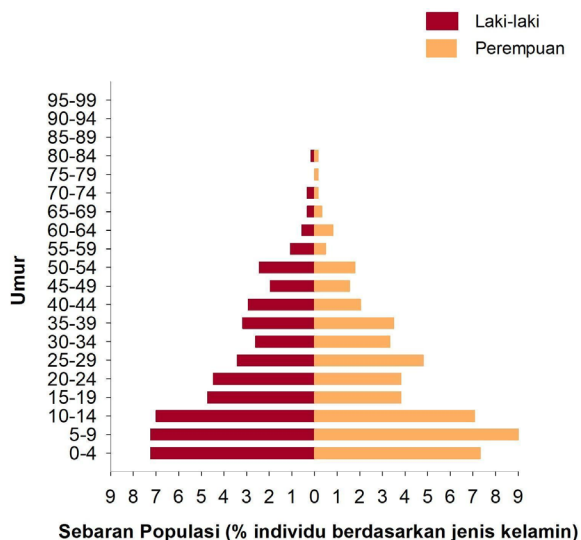


Status dan Tren: Karakteristik Demografi

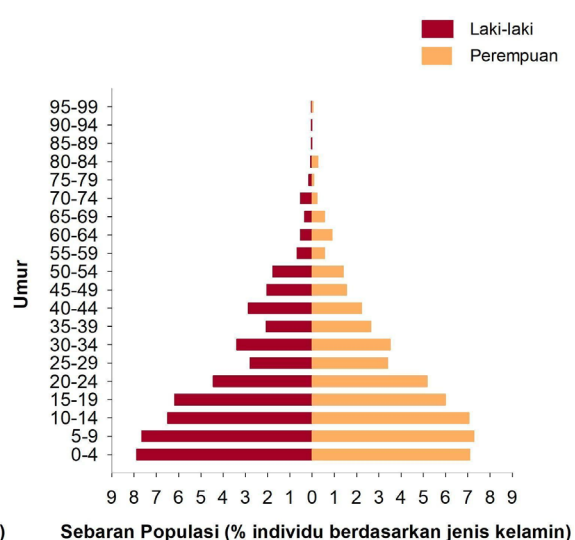
Populasi Umur dan Jenis Kelamin

Data pemantauan terbaru menunjukkan bahwa usia penduduk di KKP Kaimana pada tahun 2025 berada pada rentang umur 0-99 tahun. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di KKP Kaimana mendominasi kelompok usia yang lebih muda. Proporsi terbesar penduduk berada pada kelompok usia 0–14 tahun dan 15–34 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Distribusi penduduk usia produktif (15–64 tahun) masih relatif besar, namun mulai menunjukkan penyempitan pada kelompok usia 35 tahun ke atas. Sementara itu, proporsi penduduk lanjut usia (≥ 65 tahun) tergolong kecil, dengan jumlah yang semakin menurun pada kelompok usia tertua. Secara keseluruhan, struktur ini mencerminkan karakteristik wilayah KKP Kaimana dengan penduduk usia muda dan tingkat regenerasi yang masih tinggi pada tahun 2025.

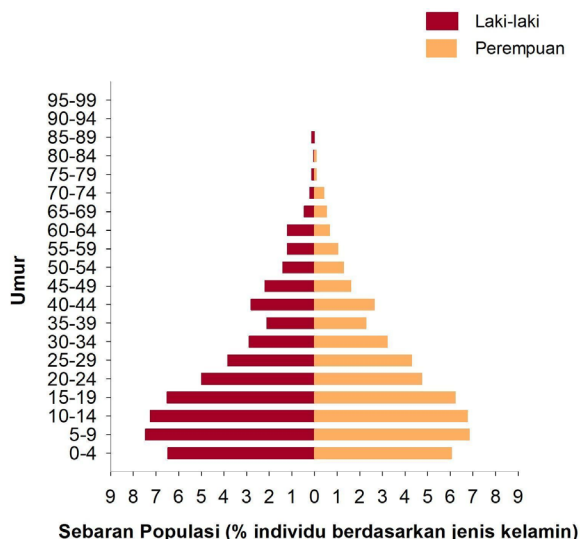
a) Tahun 2012



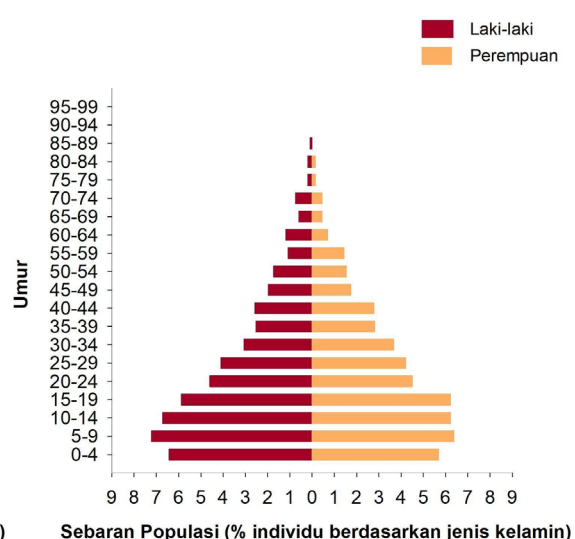
b) Tahun 2014

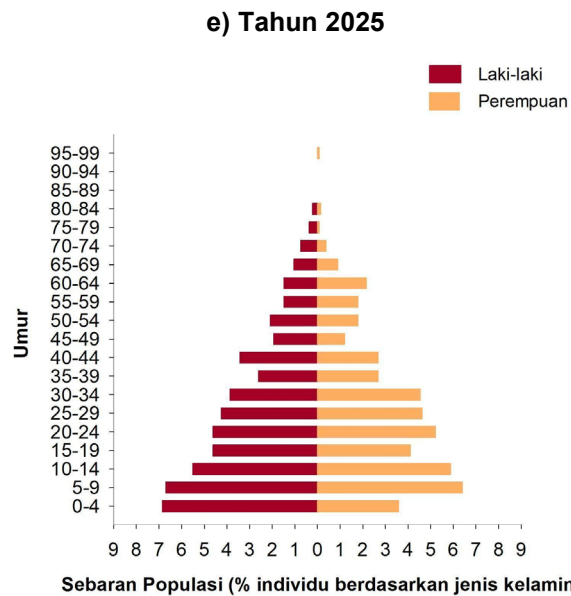


c) Tahun 2016



d) Tahun 2019



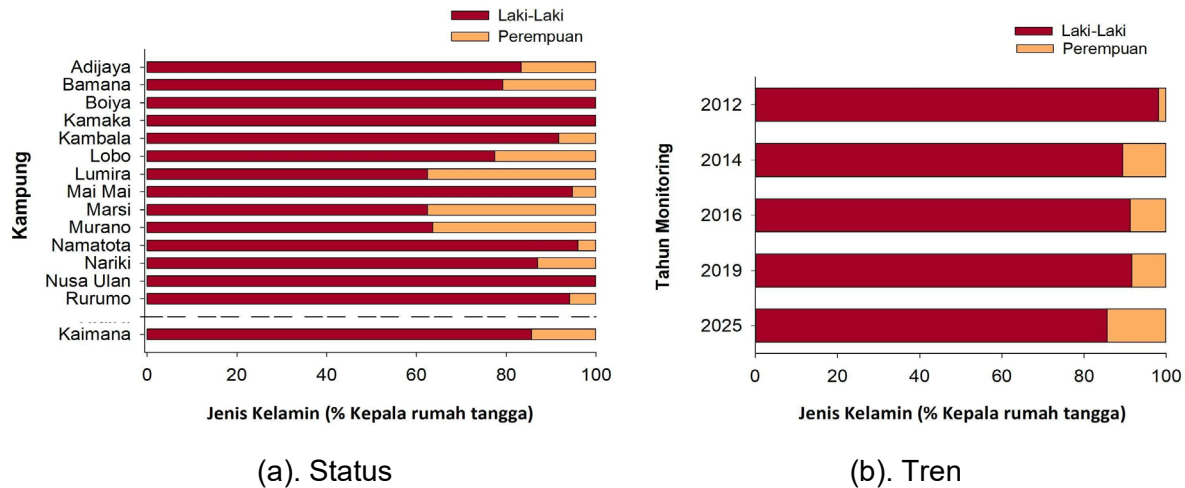


Gambar 1. Status dan Tren Populasi Umur dan Jenis Kelamin

Dalam kurun waktu pemantauan, terlihat adanya perubahan bertahap pada bentuk piramida penduduk. Pada tahun dasar 2012, struktur penduduk menunjukkan basis piramida yang sangat lebar dengan dominasi kelompok usia anak dan remaja, yang pada periode selanjutnya (2014 dan 2016) mulai menunjukkan penyempitan relatif pada kelompok usia termuda, disertai peningkatan proporsi penduduk pada kelompok usia remaja akhir dan dewasa awal. Memasuki periode 2019 hingga 2025, struktur penduduk semakin didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya pada rentang usia 20–39 tahun, sementara proporsi penduduk usia anak tetap besar namun lebih terkonsentrasi pada kelompok usia tertentu. Sepanjang periode pemantauan (tren), jumlah penduduk usia lanjut (≥ 65 tahun) tetap relatif sedikit dan tidak mengalami perubahan yang berarti, sehingga secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan struktur penduduk terjadi secara bertahap dengan kecenderungan bertambahnya proporsi masyarakat pada usia produktif.

Kepala Rumah Tangga

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, komposisi kepala rumah tangga di wilayah KKP Kaimana masih didominasi oleh laki-laki dengan proporsi mencapai 85,61% dari total rumah tangga yang disurvei. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan rumah tangga di sebagian besar kampung masih berada pada laki-laki. Meskipun demikian, terdapat variasi antar kampung dalam proporsi kepala rumah tangga perempuan. Kampung Marsi dan Lumira tercatat memiliki proporsi kepala rumah tangga perempuan tertinggi, masing-masing mencapai 37,5% dan diikuti oleh Kampung Murano (36,36%) kemudian Kampung Lobo (22,58%). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun laki-laki masih mendominasi, keberadaan perempuan sebagai kepala rumah tangga tetap menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat di beberapa kampung.

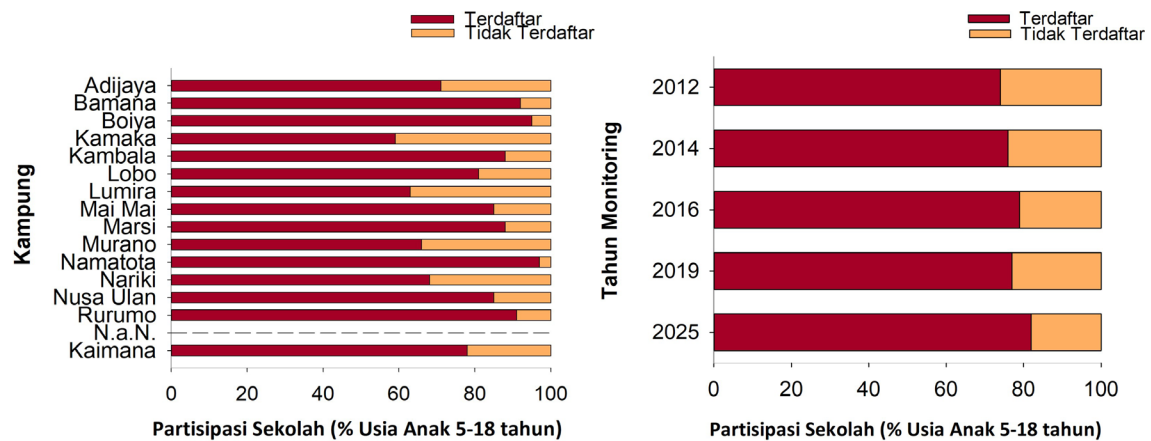


Gambar 2. Status dan Tren Kepala Rumah Tangga

Selama periode pemantauan dari tahun 2012 hingga 2025, nilai indikator ini mengalami perubahan secara bertahap. Pada awal periode pemantauan, proporsi kepala rumah tangga perempuan relatif lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini. Dalam beberapa periode pemantauan berikutnya terlihat adanya peningkatan secara bertahap pada proporsi kepala rumah tangga perempuan. Pada tahun 2025, jumlah kepala rumah tangga perempuan meningkat sebesar 12,47% dibandingkan kondisi pada awal pemantauan. Tren ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam struktur rumah tangga masyarakat, meskipun kepala rumah tangga laki-laki masih tetap menjadi kelompok yang dominan.

Partisipasi Sekolah

Hasil analisis data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah anak usia 5–18 tahun di wilayah KKP Kaimana mencapai rata-rata sekitar 82% dari total anak usia sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum partisipasi pendidikan di wilayah Kaimana tergolong tinggi dan sebagian besar anak usia sekolah telah terdaftar dalam sistem pendidikan formal. Variasi antar kampung relatif kecil meskipun secara statistik menunjukkan perbedaan ($p\text{-value} = 0,001$). Kampung Namatota (97%), Boiya (95%), dan Bamana (92%) mencatat tingkat partisipasi sekolah tertinggi di wilayah pemantauan. Sebaliknya, beberapa kampung seperti Kamaka (59%), Lumira (63%), Murano (66%), Nariki (68%) dan Adijaya (71%) masih berada di bawah rata-rata kawasan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah KKP Kaimana telah memiliki capaian yang cukup baik dalam mendukung akses pendidikan, meskipun kesenjangan antar kampung masih perlu diperhatikan untuk memastikan pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan di seluruh wilayah.



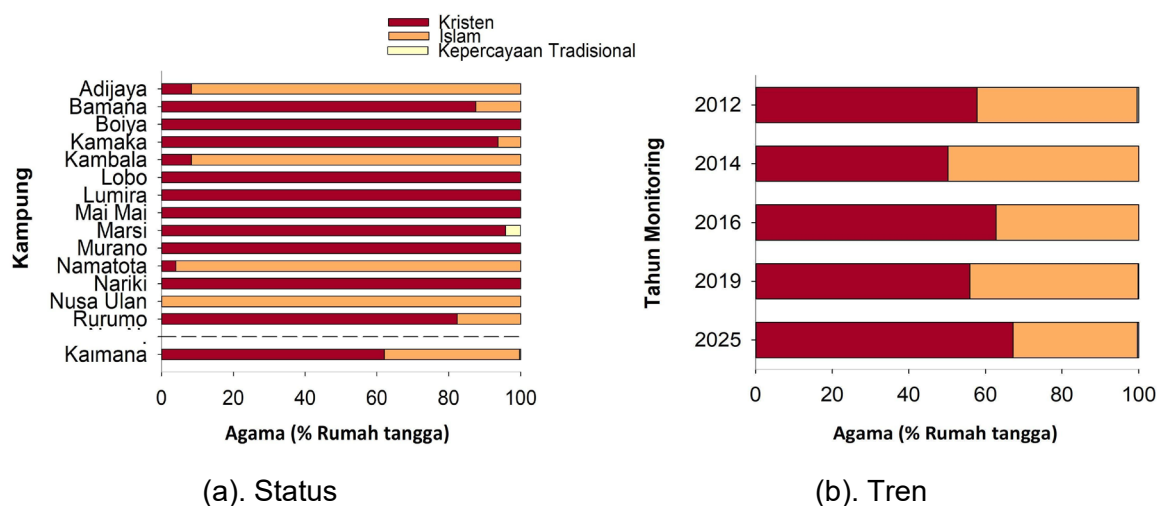
(a). Status (b). Tren

Gambar 3. Status dan Tren Partisipasi Sekolah Usia Anak

Perbandingan data antar tahun pemantauan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah anak usia 5–18 tahun di wilayah KKP Kaimana mengalami peningkatan secara bertahap sepanjang periode pemantauan. Pada awal pemantauan tahun 2012, tingkat partisipasi sekolah tercatat sekitar 74%, kemudian meningkat menjadi 76% pada tahun 2014 dan 79% pada tahun 2016. Setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 (77%), tingkat partisipasi sekolah kembali meningkat dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2025, dengan kenaikan sekitar 5% dibandingkan tahun 2019 dan sekitar 8% dibandingkan tahun dasar. Peningkatan ini didukung oleh membaiknya ketersediaan layanan pendidikan, meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta dukungan dari kelembagaan lokal. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam akses dan partisipasi pendidikan, meskipun keterbatasan akses fisik ke sekolah, kondisi ekonomi rumah tangga, dan persepsi sosial terhadap pendidikan masih menjadi tantangan di beberapa kampung.

Agama

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, komposisi agama responden di wilayah KKP Kaimana menunjukkan bahwa agama Kristen dianut oleh mayoritas rumah tangga, dengan proporsi sekitar 70% dari total responden. Kondisi ini menunjukkan bahwa agama Kristen menjadi identitas religius yang dominan di sebagian besar kampung lokasi survei. Meskipun demikian, terdapat variasi antar kampung dalam komposisi agama rumah tangga. Kampung Adijaya (91,67%), Kambala (91,67%), Namatota (96%), dan Nusa Ulan (100%) menunjukkan dominasi rumah tangga beragama Islam dengan proporsi yang sangat tinggi. Selain itu, kepercayaan tradisional masih tercatat pada sebagian kecil rumah tangga, seperti di Marsi (4,17%), meskipun proporsinya sangat terbatas. Secara keseluruhan, struktur agama responden di wilayah ini relatif homogen dengan dominasi agama Kristen, sementara agama lain tetap hadir sebagai bagian dari keragaman sosial di beberapa kampung.



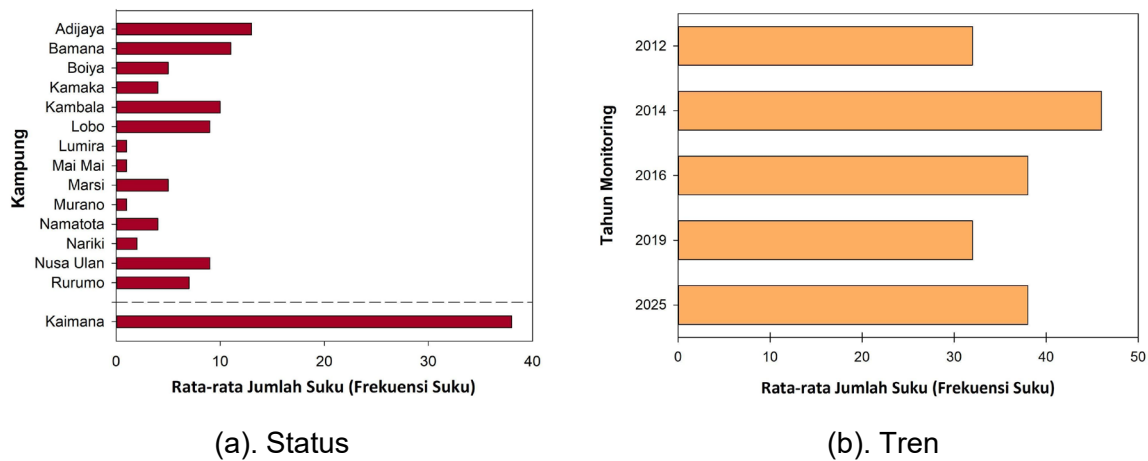
Gambar 4. Status dan Tren Agama

Sepanjang periode pemantauan, indikator ini menunjukkan bahwa komposisi agama responden di wilayah KKP Kaimana relatif stabil. Sejak awal pemantauan, agama Kristen secara konsisten menjadi kelompok dengan proporsi terbesar di sebagian besar kampung. Agama Islam tetap hadir sebagai kelompok kedua dengan proporsi yang relatif stabil, meskipun terjadi fluktuasi kecil antar periode survei. Pada tahun 2025, proporsi rumah tangga beragama Islam menurun sekitar 11,47% dibandingkan tahun 2019, sementara proporsi Kristen meningkat sekitar 11,29% pada periode yang sama. Kepercayaan tradisional tercatat dalam proporsi yang sangat terbatas dan tidak menunjukkan perubahan berarti sepanjang periode pengamatan. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa struktur agama masyarakat di wilayah KKP Kaimana cenderung mapan dan tidak mengalami pergeseran yang signifikan dalam jangka menengah hingga panjang.

Suku

Terdapat variasi kondisi keragaman suku yang cukup jelas antar kampung pada pemantauan tahun 2025. Hasil analisis diperoleh bahwa rata-rata jumlah suku yang tercatat berkisar antara 1 hingga 11 suku per kampung. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 38 suku yang teridentifikasi di seluruh lokasi survei, yang mencerminkan tingkat keragaman etnis yang cukup tinggi di wilayah ini. Sebagian besar masyarakat merupakan penduduk asli Papua, dengan suku-suku yang umum dijumpai antara lain Mairasi, Koiwai, Kamoro, Madewana, Miere, Kambrauw, dan Napiti. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok suku lainnya seperti Mbaham Matta, Biak, Biak Raja Ampat, Inanwatan, Yapen, dan Maybrat, serta masyarakat pendatang dari luar Papua seperti Seram, Kei, Ambon, Buton, Bugis, Aru, dan Minahasa dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Kehadiran masyarakat pendatang ini umumnya berkaitan dengan aktivitas pekerjaan di sektor pemerintahan, pendidikan,

kesehatan, perdagangan, maupun perikanan yang mendorong mobilitas dan interaksi sosial di wilayah KKP Kaimana.



Gambar 5. Status dan Tren Suku

Sepanjang periode pemantauan, indikator Suku menunjukkan pola fluktuatif namun relatif stabil di KKP Kaimana. Pada awal pemantauan tahun 2012, jumlah suku yang tercatat mencapai sekitar 32 suku, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi sekitar 46 suku. Setelah itu, jumlah suku mengalami penurunan bertahap hingga kembali berada pada kisaran 32 suku pada tahun 2019. Pada periode pemantauan 2025, tingkat keragaman suku kembali meningkat dengan tambahan sekitar 6 suku dibandingkan tahun 2019. Meskipun terdapat perubahan antar periode pemantauan, besarnya perubahan tersebut tidak menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam komposisi suku masyarakat. Secara umum, dinamika ini mengindikasikan bahwa keragaman suku di wilayah KKP Kaimana dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, peluang kerja di sektor pemerintah maupun swasta, serta praktik perkawinan campur antara masyarakat lokal dan pendatang yang berkembang secara bertahap di tingkat lokal.

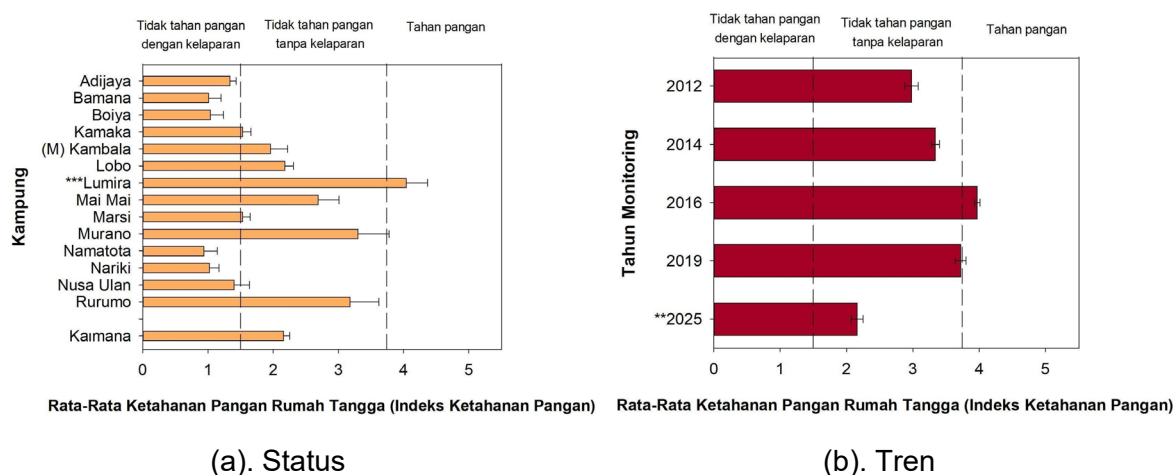
Status dan Tren: Indikator Sosial

Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan budaya lokal (Bickel et al., 2000). Sebaliknya, ketidaktahanan pangan menggambarkan kondisi ketika rumah tangga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pangan yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko penyakit menular serta berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak-anak. Dalam survei ini digunakan tiga skala ketahanan pangan rumah tangga sebagaimana dirumuskan oleh Departemen Pertanian

Amerika Serikat (Bickel et al., 2000), yaitu: (1) tahan pangan, (2) tidak tahan pangan tanpa kelaparan, dan (3) tidak tahan pangan dengan kelaparan.

Secara umum, status ketahanan pangan rumah tangga di wilayah KKP Kaimana pada tahun 2025 menunjukkan nilai rata-rata indeks sebesar 2,16, yang berada pada kategori tidak tahan pangan tanpa kelaparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga mulai menghadapi kerentanan pangan, yang ditandai dengan kekhawatiran terhadap kecukupan makanan serta penyesuaian dalam pengelolaan pangan rumah tangga. Penyesuaian tersebut umumnya dilakukan dengan menurunkan kualitas makanan atau mengubah cara rumah tangga mengatur konsumsi makanan sehari-hari, meskipun pengurangan jumlah makanan yang dikonsumsi masih relatif terbatas. Variasi antar kampung relatif kecil secara statistik ($p\text{-value} = 0,04$), namun beberapa kampung menunjukkan kondisi yang berbeda. Kampung Lumira, Murano, dan Rurumo menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dengan nilai indeks yang mendekati kategori tahan pangan, yang didukung oleh keberagaman sumber mata pencaharian seperti pertanian dan perkebunan serta akses pasar yang lebih baik. Sebaliknya, kampung Adijaya, Bamana, Boiya, Namatota, Nariki, dan Nusa Ulan masih berada pada kategori tidak tahan pangan dengan kelaparan, yang umumnya berkaitan dengan keterbatasan akses geografis ke pusat kota dan pasar, sehingga mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memperoleh bahan pangan maupun menjual hasil produksi mereka.



Gambar 6. Status dan Tren Ketahanan Pangan Rumah Tangga

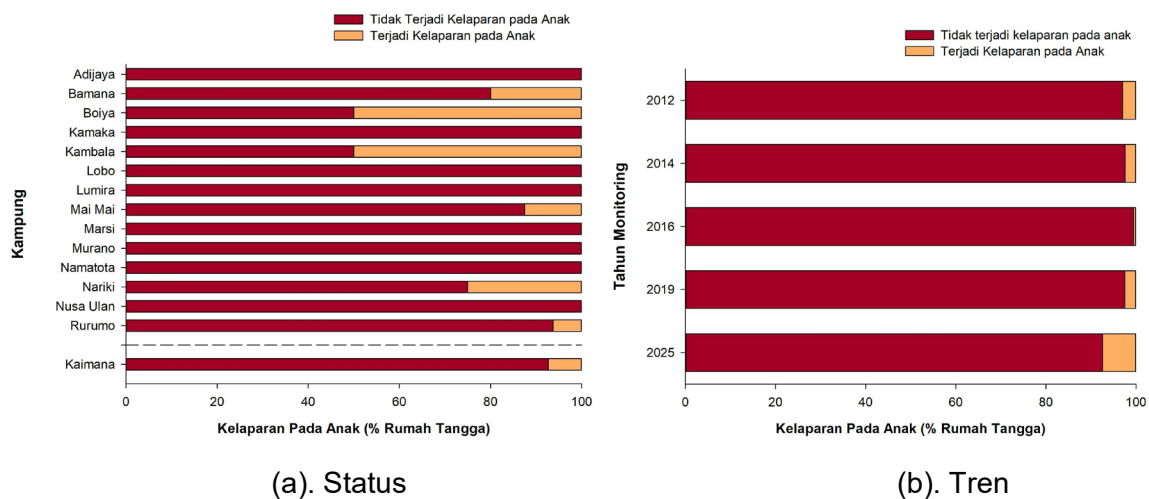
Perbandingan data antar periode pemantauan menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan rumah tangga di wilayah KKP Kaimana mengalami pola fluktuatif sepanjang periode pemantauan. Pada awal pemantauan tahun 2012, nilai indeks tercatat sebesar 2,98, yang berada pada kategori tidak tahan pangan tanpa kelaparan. Kondisi ini kemudian membaik hingga mencapai kategori tahan pangan pada tahun 2016 dengan nilai indeks sekitar 3,97. Namun pada periode berikutnya, nilai indeks kembali menurun hingga mencapai 2,16 pada tahun 2025, yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan tahun dasar. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di wilayah KKP Kaimana masih bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan

kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Perubahan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, menurunnya hasil tangkapan laut, serta keterbatasan distribusi bahan pangan ke kampung-kampung yang berjarak jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, penguatan diversifikasi sumber penghidupan dan sistem distribusi pangan menjadi faktor penting untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga di wilayah KKP Kaimana.

Ketahanan Pangan Anak

Ketahanan pangan pada anak-anak merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga, karena anak-anak yang pertama akan menjadi rentan kekurangan gizi dalam rumah tangga (Martorell, 1995). Ketahanan pangan sangat penting bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak. Anak-anak yang mengalami kerawanan pangan dapat beresiko lebih besar mengalami defisiensi nutrisi yang terkait dengan masalah perkembangan fisik dan mental (Casey et al, 2005). Status ketahanan pangan anak-anak dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2) menggunakan klasifikasi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, yaitu tidak ada bukti kelaparan pada anak dan terdapat bukti kelaparan pada anak.

Gambaran kondisi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah KKP Kaimana melaporkan tidak terjadinya kelaparan pada anak, dengan rata-rata capaian sekitar 92,6% di hampir seluruh kampung lokasi survei. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum anak-anak di wilayah pemantauan masih memiliki akses terhadap makanan yang cukup dalam rumah tangga. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 7,4% rumah tangga yang melaporkan terjadinya kelaparan pada anak. Variasi antar kampung relatif kecil, namun terdapat pengecualian pada beberapa lokasi. Kampung Kambala dan Boiya mencatat proporsi kasus kelaparan pada anak yang relatif lebih tinggi, masing-masing mencapai sekitar 50% dari rumah tangga yang disurvei. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor geografis yang membatasi akses terhadap sumber pangan serta kondisi demografi rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga yang besar, sehingga anak-anak harus berbagi porsi makanan yang terbatas dengan anggota keluarga lainnya.



Gambar 7. Status dan Tren Ketahanan Pangan Anak

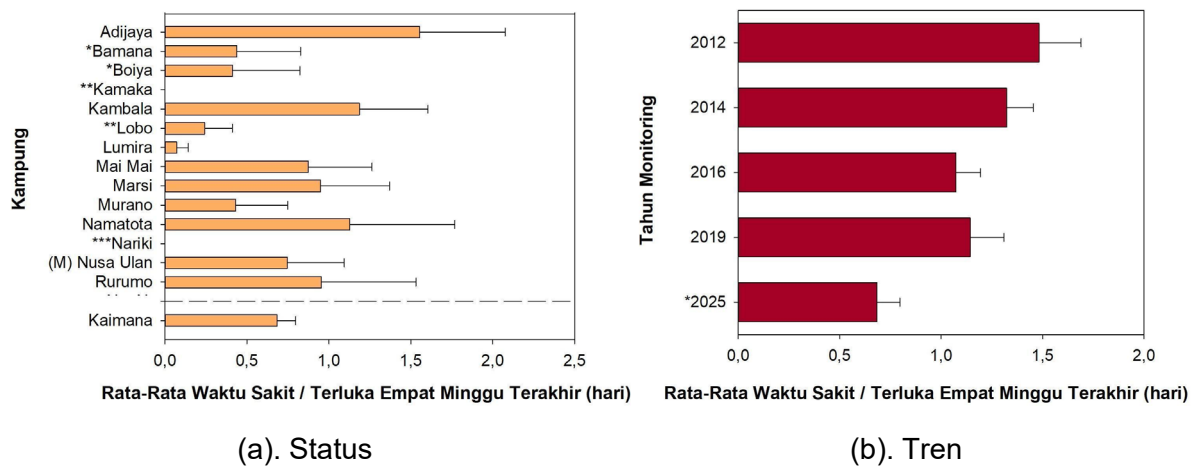
Analisis tren sejak tahun dasar 2012 hingga 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah KKP Kaimana secara konsisten melaporkan tidak terjadinya kelaparan pada anak. Pada tahun 2012, sekitar 97% rumah tangga tidak melaporkan kelaparan pada anak, dan kondisi ini relatif stabil hingga 2014 (97,6%) serta mencapai nilai tertinggi pada 2016 (99,4%). Pada periode berikutnya, proporsi tersebut sedikit menurun menjadi 97,6% pada 2019 dan 92,6% pada 2025. Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang melaporkan terjadinya kelaparan pada anak meningkat dari sekitar 3% pada 2012 menjadi 7,4% pada 2025. Meskipun mayoritas rumah tangga masih tidak mengalami kelaparan pada anak, tren ini menunjukkan adanya peningkatan kerentanan pangan pada sebagian rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap akses pangan dan kondisi ekonomi rumah tangga, terutama di kampung-kampung yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pangan.

Hari Sakit atau Cedera

Untuk mengevaluasi penyakit atau sakit yang dialami oleh setiap anggota rumah tangga yang tersampel, maka setiap rumah tangga yang disurvei ditanyakan “*apakah terdapat anggota rumah tangga yang menderita sakit atau cedera selama 4 minggu terakhir?*” Jumlah hari sakit atau cedera untuk semua individu dalam rumah tangga kemudian dijumlahkan. Batas maksimum hari sakit dalam penelitian ini adalah 28 hari atau empat (4) minggu.

Sebagian besar rumah tangga di wilayah KKP Kaimana melaporkan bahwa rata-rata jumlah hari sakit atau cedera relatif rendah, yaitu sekitar 1 hari dalam 4 minggu terakhir. Variasi antar kampung terlihat signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0,005$), meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Kampung Adijaya mencatat rata-rata hari sakit atau cedera tertinggi, yaitu sekitar 1,5–2 hari, diikuti oleh Kambala dan Namatota dengan rata-rata sekitar 1 hari. Sebaliknya, kampung Kamaka dan Nariki tidak melaporkan adanya hari sakit atau cedera dalam periode yang sama. Jenis penyakit yang paling sering dilaporkan oleh responden antara lain malaria,

batuk dan pilek, serta beberapa kasus penyakit paru-paru, sementara gejala kekurangan gizi juga ditemukan terutama pada anak-anak.



Gambar 8. Rata-Rata Sakit atau Cedera (hari)

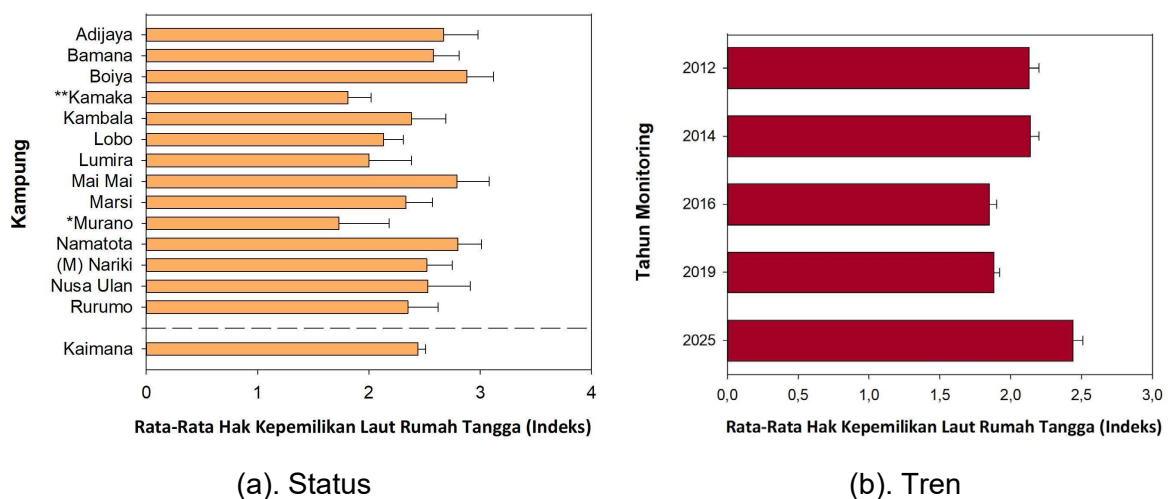
Selama periode pemantauan dari tahun 2012 sampai tahun 2025, nilai rata-rata jumlah hari sakit atau cedera di wilayah KKP Kaimana cenderung menurun secara keseluruhan. Pada awal pemantauan tahun 2012, rata-rata hari sakit tercatat sekitar 1,4–1,3 hari, kemudian menurun pada periode 2014 dan 2016 menjadi sekitar 1 hari. Meskipun sempat meningkat kembali pada 2019, nilai tersebut kembali menurun pada 2025 menjadi sekitar 0,68 hari, yang lebih rendah dibandingkan periode awal pemantauan. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Perkembangan ini juga didukung oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan formal. Untuk memperoleh layanan kesehatan, masyarakat umumnya mengakses Pustu di tingkat kampung, Puskesmas di tingkat distrik, atau berkonsultasi dengan tenaga medis seperti mantri kesehatan, yang turut berkontribusi terhadap perbaikan kondisi kesehatan masyarakat di wilayah KKP Kaimana.

Pemberdayaan Politik: Hak Kepemilikan Laut

Hak Kepemilikan Laut (*Marine Tenure Rights*) adalah kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah perairan laut yang mempengaruhi kehidupan mereka (United Nations Development Program et al. 1990). Kepemilikan laut merupakan dasar budaya dan hukum dari pengendalian sumberdaya laut lokal yang telah dikaitkan dengan manfaat sosial dan ekologi (Cinner, 2005). Survei ini mendokumentasikan kepemilikan laut rumah tangga sebagai jumlah hak milik yang terpisah (misalnya, hak untuk mengakses, memanen, mengelola sumber daya laut, dan membuat keputusan) yang dilaksanakan oleh rata-rata rumah tangga di KKP dalam 12 bulan sebelum survei. Indeks kepemilikan laut dihitung berdasarkan serangkaian pertanyaan dalam survei

rumah tangga yang mendokumentasikan partisipasi rumah tangga dalam tata kelola sumber daya laut, dengan kisaran skor mulai dari 0 hingga 5.

Hasil survei tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata indeks penggunaan hak kepemilikan laut rumah tangga di wilayah KKP Kaimana berada pada kisaran menengah, dengan nilai sekitar 2,44 dari 5 jenis hak yang diamati. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat umumnya memiliki pengakuan terhadap sebagian hak akses dan pemanfaatan sumber daya laut, namun belum sepenuhnya memiliki atau menjalankan seluruh jenis hak yang tersedia. Variasi antar kampung terlihat meskipun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p\text{-value} = 0,1$). Kampung Boiya, Mai Mai, Namatota, dan Adijaya mencatat nilai indeks yang relatif lebih tinggi, mendekati tiga jenis hak, yang menunjukkan keterlibatan yang lebih besar dalam akses, pemanfaatan, dan pengambilan keputusan terkait sumber daya laut. Di beberapa kampung seperti Adijaya, Nusa Ulan, dan Kambala, sistem kepemilikan laut juga masih dipengaruhi oleh sistem petuanan atau hak berdasarkan marga. Sebaliknya, kampung Kamaka dan Murano menunjukkan nilai indeks yang lebih rendah, yang mengindikasikan keterbatasan rumah tangga dalam mengklaim atau menjalankan hak-hak kelautan. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan dinamika sosial dan tata kelola sumber daya laut antar kampung, yang dipengaruhi oleh sejarah lokal, kekuatan kelembagaan adat, serta interaksi masyarakat dengan kawasan konservasi.



Gambar 9. Status dan Tren Kepemilikan Laut Rumah Tangga

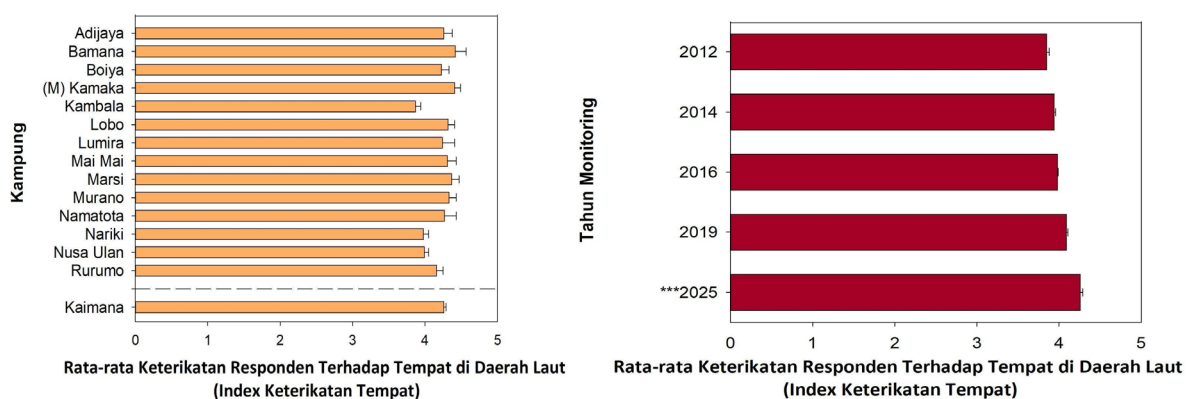
Nilai indikator ini mengalami peningkatan dan penurunan (pola fluktuatif) antar periode survei. Pada awal pemantauan tahun 2012, nilai indeks tercatat sekitar 2,13, kemudian menurun pada 2016 menjadi sekitar 1,85. Pada periode berikutnya, nilai indeks kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 2,44 pada tahun 2025, yang merupakan nilai lebih tinggi dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengakuan dan implementasi hak kepemilikan laut rumah tangga di wilayah KKP Kaimana. Fluktuasi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan dalam pengelolaan

kawasan konservasi, program pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal dalam tata kelola sumber daya laut. Secara keseluruhan, peningkatan pada tahun 2025 memberikan sinyal positif terhadap penguatan pengakuan hak kelautan masyarakat, meskipun upaya berkelanjutan masih diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan di seluruh kampung.

Budaya: Keterikatan Tempat

Keterikatan terhadap tempat yang dimaksud adalah hubungan emosional antara individu dan lingkungan laut masing-masing (Williams dan Vaske, 2003). Untuk mengukur seberapa kuat hubungan emosi antara individu yang berada di sekitar lingkungan laut dan lingkungannya, dilakukan studi dengan menggunakan indeks keterikatan emosi antara individu dan wilayah perairannya (*Place Attachment Index*) yang nilainya berkisar antara 0 sampai 5. Nilai 5 menunjukkan adanya hubungan emosi yang sangat kuat antara individu dan lingkungan laut di sekitarnya.

Hasil analisis data tahun 2025 memperlihatkan bahwa tingkat keterikatan emosional responden terhadap laut lokal di wilayah KKP Kaimana tergolong tinggi, dengan rata-rata indeks sekitar 4,26 dari skala 5. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan laut sebagai bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan mata pencaharian mereka. Variasi antar kampung relatif kecil, namun beberapa kampung menunjukkan nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kampung Boiya (4,36), Namatota (4,37), dan Rurumo (4,42) mencatat nilai keterikatan tempat yang paling tinggi, sementara Kambala (3,99) menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan kampung lainnya. Meskipun demikian, seluruh kampung masih berada pada kisaran nilai yang tinggi, yang menunjukkan bahwa keterikatan masyarakat terhadap wilayah laut tetap kuat di seluruh kawasan. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa laut memiliki makna ekologis, ekonomi, dan budaya yang penting bagi masyarakat di wilayah KKP Kaimana.



(a). Status (b). Tren

Gambar 10. Status dan Tren Keterikatan Tempat Rumah Tangga

Perbandingan data antar tahun pemantauan menunjukkan bahwa tingkat keterikatan emosional masyarakat terhadap laut lokal di wilayah KKP Kaimana mengalami peningkatan secara bertahap. Pada awal pemantauan tahun 2012, nilai rata-rata indeks keterikatan tempat tercatat sekitar 3,85, kemudian meningkat menjadi 3,94 pada 2014 dan 3,98 pada 2016. Peningkatan ini berlanjut pada 2019 dengan nilai sekitar 4,09, dan mencapai nilai tertinggi pada 2025 yaitu sekitar 4,26. Tren ini menunjukkan bahwa hubungan emosional masyarakat dengan wilayah laut mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peran laut sebagai sumber mata pencaharian, ruang sosial dan budaya masyarakat, serta lamanya domisili masyarakat sebagai penduduk asli yang memiliki keterikatan historis dengan wilayah laut mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas terkait laut, seperti penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, turut memperkuat ikatan emosional masyarakat dengan lingkungan laut di wilayah KKP Kaimana.

Status dan Tren: Karakteristik Ekonomi

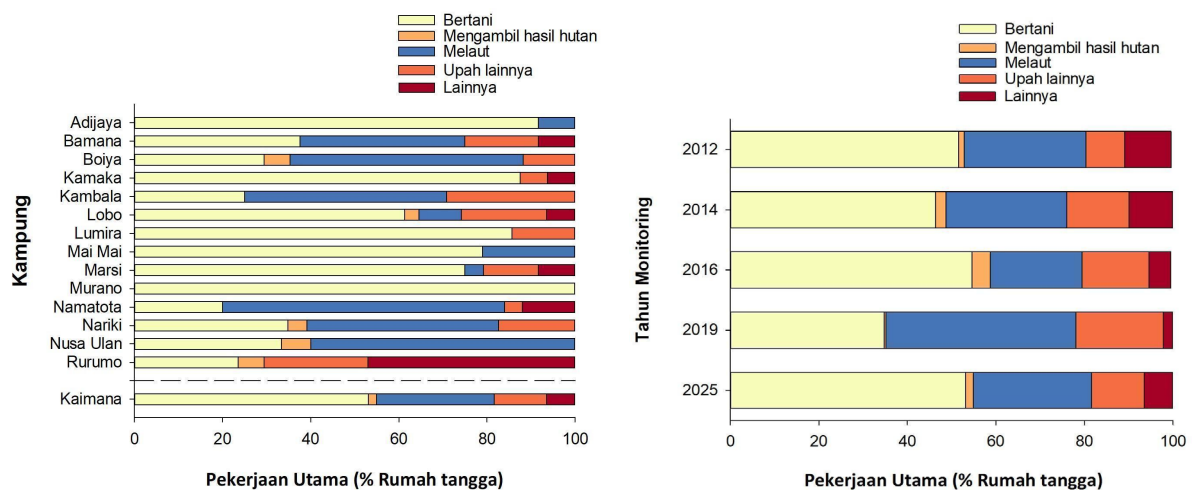
Karakteristik ekonomi yang digunakan dalam kajian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pekerjaan utama dan aset rumah tangga. Pekerjaan utama mengacu pada cara utama yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pekerjaan utama ini digolongkan dalam lima kategori, yakni: bertani, yang meliputi budidaya tanaman atau berternak; mengambil hasil hutan, yang mencakup hasil hutan kayu dan nonkayu (sayur, buah-buahan, obat-obatan, kulit kayu, tali hutan, rotan, protein dari hewan); melaut, yang mencakup kegiatan menangkap ikan, crustaceans, dan sumber daya lainnya, baik untuk dijual maupun untuk konsumsi sendiri; pekerjaan yang menghasilkan upah lainnya, seperti guru, tenaga kesehatan, kehutanan, pekerja tambang, dan lainnya; serta kategori lainnya, yang mencakup pekerjaan yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti menukar jasa atau barang.

Selain itu, aset rumah tangga dalam kajian ini didefinisikan sebagai materi yang secara fisik dimiliki oleh rumah tangga dan masih dalam kondisi berfungsi dengan baik. Aset-aset yang dimiliki rumah tangga di wilayah yang disurvei antara lain adalah radio, stereo, CD player, DVD player, TV, parabola, telepon (baik ponsel maupun telepon kabel), generator, perahu motor tanpa mesin, perahu motor mesin luar, perahu motor mesin dalam, sepeda, sepeda motor, serta mobil atau truk.

Pekerjaan Utama

Pada sebagian besar kampung yang disurvei tahun 2025, struktur pekerjaan utama rumah tangga di wilayah KKP Kaimana didominasi oleh sektor pertanian, yang mencakup sekitar 53,07% dari total rumah tangga. Aktivitas ini diikuti oleh kegiatan melaut sebagai mata pencaharian utama bagi sekitar 26,71% rumah tangga, sementara sebagian kecil lainnya bekerja pada sektor upah tetap (seperti aparatur sipil negara, staf LSM atau pengelola KKP, buruh tetap, dan karyawan swasta) maupun pekerjaan informal seperti perdagangan kecil dan

buruh bangunan. Variasi antar kampung terlihat cukup jelas, di mana kampung Murano (100%), Adijaya (92%), Kamaka (88%), Lumira (86%), Mai Mai (79%), dan Marsi (75%) menunjukkan dominasi kegiatan pertanian, terutama melalui pengelolaan kebun pala, kelapa, serta tanaman buah dan sayuran. Sebaliknya, aktivitas melaut lebih banyak menjadi mata pencaharian utama di kampung Namatota (64%), Nusa Ulan (60%), dan Boiya (53%). Selain itu, sebagian kecil rumah tangga juga memanfaatkan hasil hutan seperti gaharu dan tokok sagu, meskipun proporsinya relatif rendah yaitu sekitar 1,80%. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa mata pencaharian rumah tangga di wilayah KKP Kaimana masih sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam, baik dari sektor pertanian maupun perikanan.



(a). Status

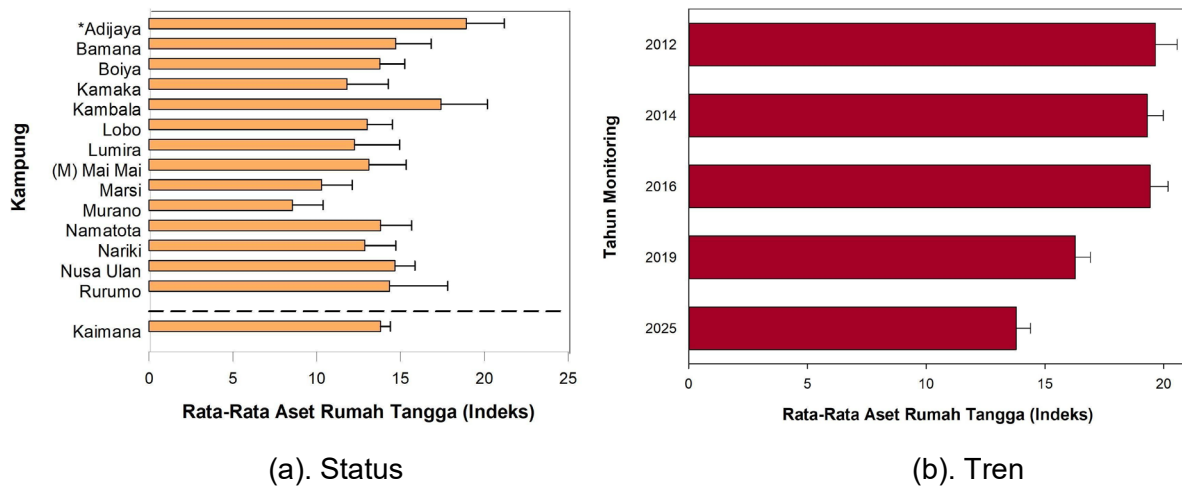
(b). Tren

Gambar 11. Status dan Tren Pekerjaan Utama Rumah Tangga

Analisis tren sejak tahun dasar 2012 hingga 2025 menunjukkan bahwa struktur pekerjaan utama rumah tangga di wilayah KKP Kaimana mengalami perubahan yang cukup dinamis. Pada awal pemantauan tahun 2012, kegiatan bertani telah menjadi mata pencaharian utama dengan proporsi sekitar 51,53%, sementara aktivitas melaut mencapai sekitar 27,51%. Proporsi pertanian sempat menurun pada 2014 (46,31%), kemudian meningkat kembali pada 2016 (54,62%), sebelum turun pada 2019 (34,78%) ketika aktivitas melaut meningkat hingga 42,93%. Pada tahun 2025, sektor pertanian kembali menjadi mata pencaharian dominan (53,07%), sementara aktivitas melaut menurun menjadi 26,71%. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran sementara antara sektor pertanian dan perikanan dalam struktur mata pencaharian masyarakat. Dinamika tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi musim dan cuaca yang mempengaruhi aktivitas melaut, ketersediaan akses pasar (termasuk pembeli atau penadah hasil), serta fluktuasi harga jual hasil perikanan dan pertanian yang turut menentukan pilihan pekerjaan utama rumah tangga.

Aset Rumah Tangga

Hasil analisis data tahun 2025 memperlihatkan bahwa profil kesejahteraan ekonomi rumah tangga di wilayah KKP Kaimana, yang diukur melalui indeks kepemilikan aset, menunjukkan variasi antar kampung. Rata-rata indeks aset rumah tangga berada pada kisaran menengah, yaitu sekitar 13–14, dengan perbedaan yang cukup terlihat antar kampung ($p\text{-value} = 0,08$). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki sejumlah aset dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Kampung Adijaya (18,92) dan Kambala (17,41) mencatat nilai indeks aset tertinggi, yang menunjukkan tingkat kepemilikan aset rumah tangga yang relatif lebih baik dibandingkan kampung lainnya. Sebaliknya, kampung Murano (8,55) dan Marsi (10,29) menunjukkan nilai indeks yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan. Aset yang paling umum dimiliki rumah tangga antara lain perahu tanpa mesin, perahu dengan mesin tempel, peralatan rumah tangga seperti generator dan radio, serta sarana komunikasi terutama telepon genggam. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi rumah tangga di wilayah KKP Kaimana masih bervariasi antar kampung, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan sumber mata pencaharian, akses pasar, serta peluang ekonomi yang tersedia di masing-masing wilayah.



Gambar 12. Status dan Tren Rata-Rata Kepemilikan Aset Rumah Tangga (indeks)

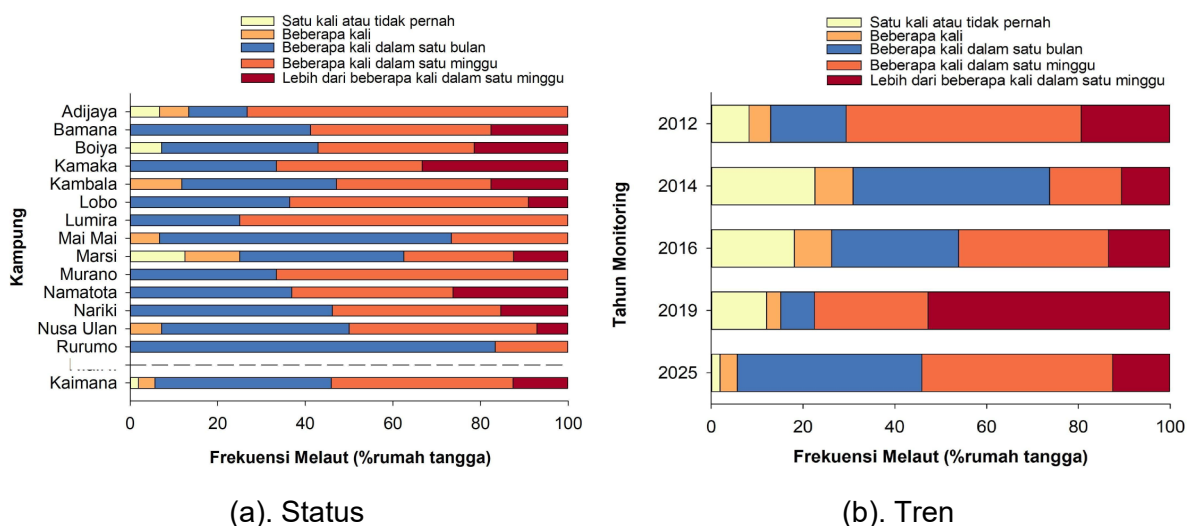
Perubahan kondisi dari tahun 2012 hingga 2025 menunjukkan bahwa rata-rata indeks aset rumah tangga di wilayah KKP Kaimana mengalami penurunan secara bertahap sepanjang periode pemantauan. Pada awal pemantauan tahun 2012, nilai rata-rata indeks aset tercatat sekitar 19,65, kemudian relatif stabil pada 2014 (19,31) dan 2016 (19,43). Setelah itu, nilai indeks mulai menurun pada 2019 (16,28) dan kembali turun menjadi sekitar 13,8 pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan adanya penurunan kapasitas aset rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah dan kualitas aset yang dimiliki rumah tangga, terutama karena usia pakai aset yang sudah lama seperti perahu namun masih berfungsi dengan baik, keterbatasan daya beli untuk mengganti atau menambah aset baru, adanya aset lama yang rusak atau tidak lagi berfungsi. Secara

keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan aset baru di sebagian besar rumah tangga masih terbatas, sehingga berdampak pada menurunnya nilai indeks aset rumah tangga di wilayah KKP Kaimana.

Status dan Tren: Penggunaan Sumberdaya Laut

Frekuensi Melaut

Secara umum, frekuensi melaut rumah tangga di wilayah KKP Kaimana pada tahun 2025 umumnya berada pada kategori beberapa kali dalam satu minggu (2 sampai 3 kali melaut) hingga beberapa kali dalam satu bulan (kurang dari 5 kali sebulan). Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas melaut masih menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh rumah tangga yang bergantung pada sumber daya laut sebagai bagian dari mata pencaharian mereka. Variasi antar kampung terlihat dalam intensitas frekuensi melaut yang dilaporkan oleh responden. Kampung Lumira (75%), Adijaya (73,33%), Murano (66,67%), dan Lobo (54,55%) menunjukkan proporsi yang tinggi pada kategori beberapa kali dalam satu minggu, sementara kampung Mai Mai (66,67%) dan Rurumo (83,33%) lebih banyak berada pada kategori beberapa kali dalam satu bulan. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik mata pencaharian, akses terhadap sumber daya laut, serta permintaan pasar, seperti keberadaan pembeli atau pengepul hasil tangkapan di kampung. Selain itu, frekuensi melaut juga dipengaruhi oleh kondisi musim dan cuaca, di mana aktivitas melaut cenderung menurun pada periode Juni hingga Agustus ketika musim angin dan ombak dianggap tidak aman, dan meningkat pada periode Januari sampai awal Juni serta September sampai Desember ketika kondisi laut lebih mendukung. Berdasarkan data survei rumah tangga, jenis ikan yang paling umum ditangkap antara lain tenggiri, kakap merah, bobara, hiu, cakalang, dan kerapu, serta beberapa jenis lain seperti barakuda, lema/kembung, talang-talang (lasi), dan nauti, yang umumnya dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga maupun dijual.

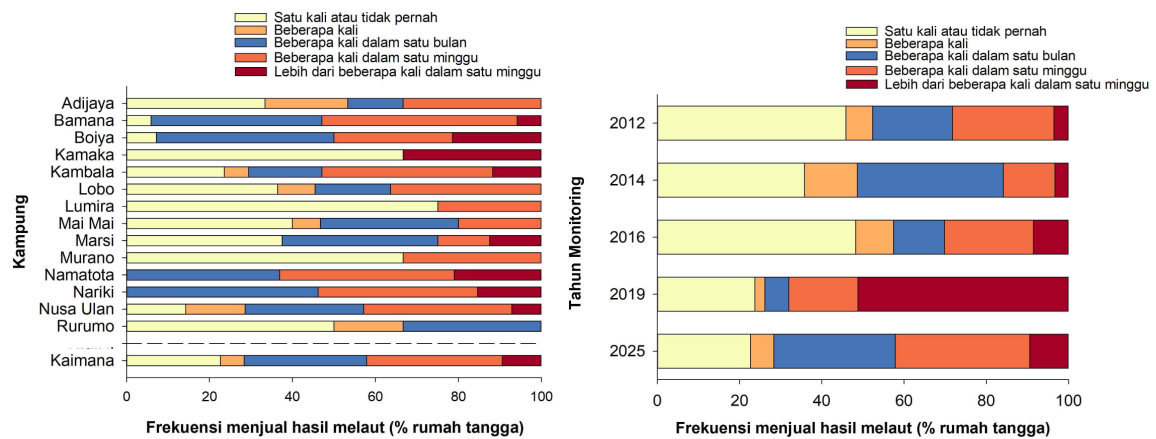


Gambar 13. Status dan Tren Frekuensi Melaut

Analisis tren sejak tahun dasar 2012 hingga 2025 menunjukkan bahwa frekuensi melaut rumah tangga di wilayah KKP Kaimana mengalami pola yang fluktuatif. Pada tahun 2012, sebagian besar rumah tangga melaut beberapa kali dalam satu minggu (51,18%), diikuti oleh kategori lebih dari beberapa kali dalam satu minggu atau hampir setiap hari (19,41%), yang menunjukkan aktivitas melaut yang cukup intensif. Pada periode 2014, frekuensi melaut cenderung menurun, yang tercermin dari meningkatnya proporsi rumah tangga yang hanya melaut beberapa kali dalam satu bulan (42,86%). Aktivitas melaut kembali meningkat pada 2019, ketika kategori lebih dari beberapa kali dalam satu minggu menjadi dominan dengan proporsi 52,74%. Pada tahun 2025, frekuensi melaut kembali didominasi oleh kategori beberapa kali dalam satu minggu (41,51%) dan beberapa kali dalam satu bulan (40,25%), sementara kategori melaut sangat intensif menurun menjadi sekitar 12,58%. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa aktivitas melaut masyarakat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi musim dan cuaca, ketersediaan sumber daya ikan, akses pasar dan harga ikan, serta pembagian waktu masyarakat untuk kegiatan pertanian seperti pengelolaan kebun pala dan kopra.

Frekuensi Menjual Ikan

Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa frekuensi menjual hasil tangkapan ikan rumah tangga di wilayah KKP Kaimana umumnya berada pada kategori beberapa kali dalam satu minggu hingga beberapa kali dalam satu bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan hasil tangkapan masih menjadi bagian penting dari sistem mata pencaharian rumah tangga nelayan, meskipun tidak seluruh hasil tangkapan selalu dijual. Variasi antar kampung terlihat dalam intensitas penjualan ikan. Kampung Bamana (47,06%), Kambala (41,18%), Namatota (42,11%), dan Nariki (38,46%) menunjukkan proporsi rumah tangga yang menjual ikan cukup tinggi pada kategori beberapa kali dalam satu minggu (2 sampai 3 kali), sementara kampung seperti Rurumo (50%), Lumira (75%), dan Murano (66,67%) lebih banyak berada pada kategori jarang atau hampir tidak pernah menjual ikan. Pola ini sejalan dengan variasi frekuensi melaut yang menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga melakukan aktivitas penangkapan secara intensif atau berorientasi pasar. Secara umum, hasil tangkapan ikan dijual langsung kepada penadah atau kapal timbang, kemudian sebagian dapat dijual ke pasar di kota jika transportasi memungkinkan, serta dijual dalam skala kecil di tingkat kampung. Selain itu, sebagian hasil tangkapan juga dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga, sehingga frekuensi penjualan ikan tidak selalu sebanding dengan frekuensi melaut masyarakat.



(a). Status (b). Tren

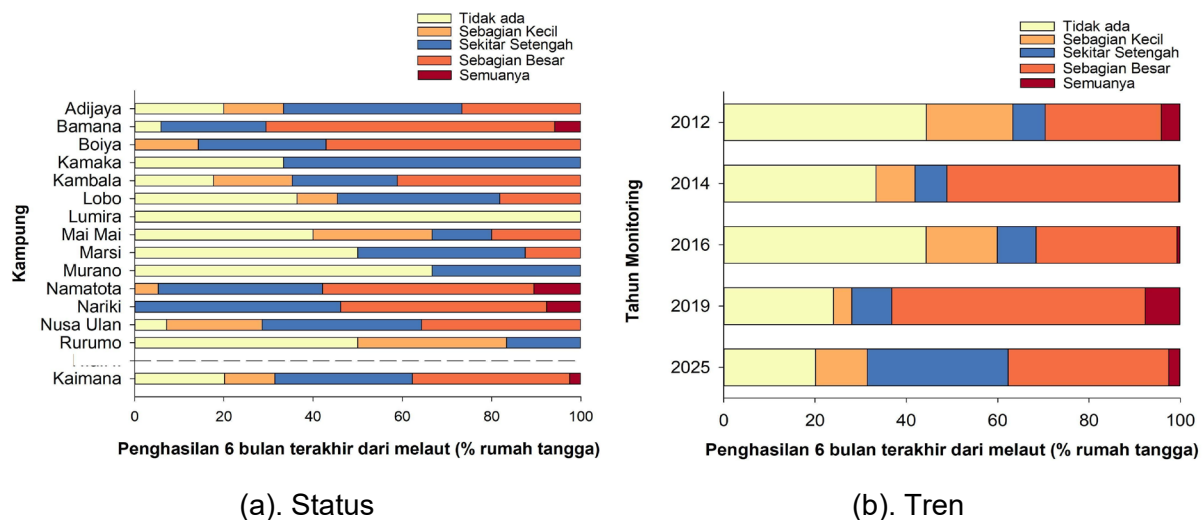
Gambar 14. Status dan Tren Frekuensi Menjual Ikan (% rumah tangga)

Perbandingan data antar periode pemantauan menunjukkan bahwa frekuensi menjual hasil tangkapan ikan rumah tangga di wilayah KKP Kaimana mengalami perubahan yang cukup dinamis. Pada awal pemantauan tahun 2012, sebagian besar rumah tangga jarang atau tidak pernah menjual ikan (45,88%), sementara kategori penjualan beberapa kali dalam satu minggu mencapai sekitar 24,71%. Pada periode 2014, proporsi rumah tangga yang menjual ikan beberapa kali dalam satu bulan meningkat (35,43%), yang menunjukkan bahwa penjualan ikan lebih banyak dilakukan secara berkala dalam satu bulan. Aktivitas penjualan kemudian meningkat cukup signifikan pada 2019, ketika kategori lebih dari beberapa kali dalam satu minggu mencapai 51,2%, yang mencerminkan intensitas penjualan hasil tangkapan yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, frekuensi penjualan kembali lebih didominasi oleh kategori beberapa kali dalam satu minggu (32,70%) dan beberapa kali dalam satu bulan (29,56%), sementara kategori penjualan sangat intensif menurun menjadi sekitar 9,43%. Secara keseluruhan, tren ini sejalan dengan dinamika frekuensi melaut, di mana intensitas penjualan ikan cenderung meningkat ketika aktivitas melaut lebih tinggi dan menurun ketika rumah tangga lebih banyak memanfaatkan hasil tangkapan untuk konsumsi rumah tangga atau ketika kondisi cuaca, musim, dan akses pasar membatasi aktivitas penangkapan dan penjualan ikan.

Penghasilan Penangkapan Ikan

Gambaran kondisi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kontribusi penghasilan rumah tangga dari kegiatan melaut dalam enam bulan terakhir di wilayah KKP Kaimana menunjukkan variasi yang cukup besar antar kampung. Secara umum, sebagian rumah tangga melaporkan bahwa sekitar setengah hingga sebagian besar pendapatan mereka berasal dari kegiatan melaut, misalnya di Boiya (57,14%), Bamana (64,71%), Namatota (47,37%), dan Nariki (46,15%) pada kategori sebagian besar pendapatan dari melaut. Di beberapa kampung lain,

kontribusi melaut berada pada kategori sekitar setengah dari pendapatan rumah tangga, seperti di Kamaka (66,67%), Adijaya (40%), dan Lobo (36,36%). Sebaliknya, terdapat pula kampung dengan proporsi rumah tangga yang tidak memperoleh penghasilan dari melaut, seperti Lumira (100%), Murano (66,67%), serta sebagian rumah tangga di Rurumo (50%) dan Marsi (50%). Perbedaan ini mencerminkan keragaman struktur mata pencaharian masyarakat, di mana sebagian rumah tangga lebih bergantung pada kegiatan pertanian dan perkebunan. Di wilayah Buruway, misalnya, banyak masyarakat yang mengombinasikan berkebun dan melaut, sementara pada periode tertentu masyarakat lebih memilih menjual kopra ketika harga pasar sedang baik. Selain itu, di kampung Adijaya dan Nusa Ulan, keterbatasan akses pasar ke Kota Kaimana, harga jual ikan yang relatif rendah di tingkat kampung, serta biaya bahan bakar (BBM) yang tinggi juga mempengaruhi kontribusi pendapatan dari kegiatan melaut. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian rumah tangga melaut sering menjadi sumber pendapatan tambahan, yang dilakukan setelah kegiatan ekonomi utama di darat seperti berkebun pala atau produksi kopra.



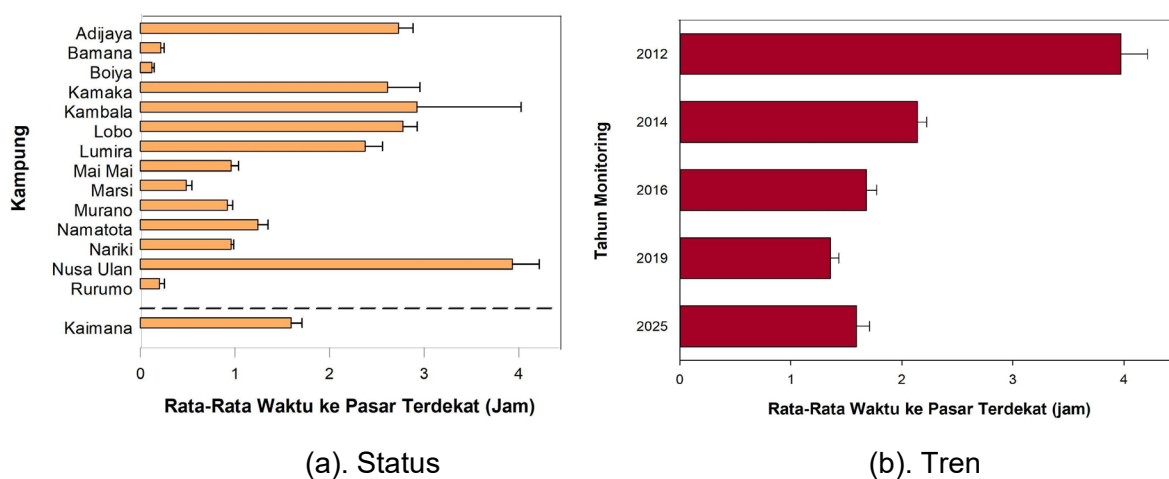
Gambar 15. Status dan Tren Penghasilan Penangkapan Ikan

Analisis tren sejak tahun dasar 2012 hingga 2025 menunjukkan bahwa kontribusi penghasilan rumah tangga dari kegiatan melaut dalam enam bulan terakhir di wilayah KKP Kaimana mengalami perubahan yang cukup dinamis. Pada 2012, proporsi terbesar rumah tangga melaporkan tidak memperoleh penghasilan dari melaut (44,38%), sementara kategori sebagian besar pendapatan dari melaut mencapai sekitar 25,44%. Pada 2014, kontribusi melaut meningkat cukup signifikan dengan dominasi kategori sebagian besar pendapatan (50,83%). Pola ini kembali terlihat pada 2019, ketika kategori sebagian besar pendapatan dari melaut mencapai sekitar 55,56%, menunjukkan bahwa kegiatan melaut menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak rumah tangga pada periode tersebut. Pada 2025, proporsi rumah tangga dengan kontribusi sekitar setengah pendapatan dari melaut meningkat menjadi 30,82%, sementara kategori sebagian besar menurun menjadi sekitar 35,22%. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa peran kegiatan melaut dalam pendapatan rumah

tangga bersifat dinamis, yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor seperti perubahan pilihan mata pencaharian, kondisi musim dan hasil tangkapan, harga komoditas lain seperti pala atau kopra, serta akses pasar dan biaya operasional seperti BBM.

Akses ke Pasar

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, rata-rata waktu tempuh rumah tangga menuju pasar terdekat di wilayah KKP Kaimana menunjukkan variasi yang cukup besar antar kampung, dengan rata-rata kawasan sekitar 1,6 jam. Beberapa kampung memiliki waktu tempuh yang relatif lebih lama, seperti Nusa Ulan (3,93 jam), Kambala (2,92 jam), Lobo (2,77 jam), dan Adijaya (2,73 jam), yang menunjukkan keterbatasan akses terhadap pasar untuk membeli kebutuhan pokok maupun menjual hasil tangkapan. Sebaliknya, kampung seperti Boiya (0,12 jam), Rurumo (0,20 jam), dan Bamana (0,21 jam) memiliki akses pasar yang relatif lebih dekat. Perbedaan ini berkaitan dengan lokasi pasar yang dapat berada di dalam kampung maupun di luar kampung. Untuk pasar yang berada di dalam kampung, masyarakat umumnya berjalan kaki menuju kios sembako atau penadah hasil laut, sementara untuk pasar yang berada di luar kampung masyarakat menggunakan perahu atau longboat, yang umumnya menggunakan mesin 15 PK. Tujuan pasar utama yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat antara lain Potawai, Lakahia, Kota Kaimana, serta Pasar Baru atau Air Tiba. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pasar di wilayah KKP Kaimana masih bervariasi, yang dapat mempengaruhi kemudahan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok maupun memasarkan hasil laut mereka.



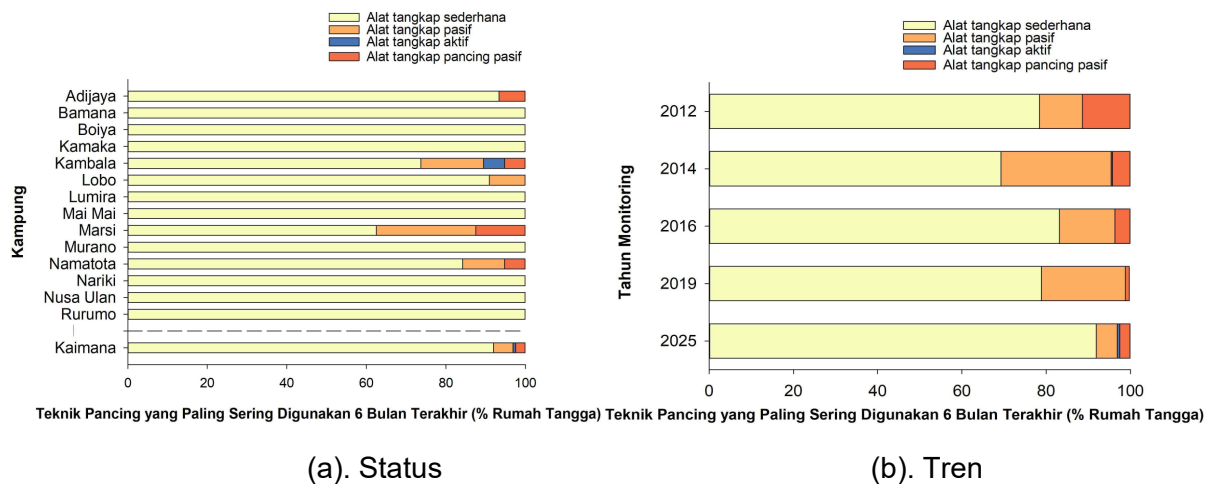
Gambar 16. Status dan Tren Rata rata waktu tempuh ke pasar (jam)

Sepanjang periode pemantauan dari tahun dasar 2012 hingga 2025, indikator rata-rata waktu tempuh rumah tangga menuju pasar terdekat di wilayah KKP Kaimana mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada awal pemantauan tahun 2012, rata-rata waktu tempuh tercatat

sekitar 3,97 jam, yang mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pasar pada periode tersebut. Waktu tempuh ini kemudian menurun pada tahun 2014 (2,14 jam) dan kembali menurun pada 2016 (1,68 jam). Penurunan berlanjut hingga mencapai nilai terendah pada 2019 (1,36 jam), yang menunjukkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap pasar. Pada tahun 2025, rata-rata waktu tempuh sedikit meningkat menjadi sekitar 1,59 jam, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan kondisi awal pemantauan. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap pasar cenderung membaik dalam jangka panjang, yang kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan sarana transportasi, penggunaan perahu bermotor, serta berkembangnya kios atau pasar kecil di tingkat kampung.

Teknik Penangkapan Ikan

Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa teknik penangkapan ikan yang paling sering digunakan oleh rumah tangga di wilayah KKP Kaimana dalam enam bulan terakhir didominasi oleh alat tangkap sederhana seperti pancing dasar, kalawai/tombak dan menggunakan tangan (area pasang surut atau bameti). Sebagian besar kampung menunjukkan proporsi penggunaan teknik ini yang sangat tinggi, bahkan mencapai 100% di beberapa lokasi seperti Rurumo, Nusa Ulan, Nariki, Murano, Mai Mai, Lumira, Kamaka, Boiya, dan Bamana. Di beberapa kampung lain masih terdapat variasi penggunaan alat tangkap lain, seperti jaring insang dan pancing dasar, misalnya di Marsi (62,5% pancing dasar, 25% jaring insang atau jaring dasar, dan 12,5% tali rawai), Kambala (73,68% pancing dasar, 15,79% jaring insang atau jaring dasar, serta sebagian kecil menggunakan jaring aktif seperti pukot tarik dan tali rawai), serta Namatota yang juga mencatat penggunaan jaring insang atau jaring dasar (10,53%) dan tali rawai (5,26%). Di beberapa kampung seperti Adijaya, Nusa Ulan, dan Kambala, masyarakat masih mengenal sistem sasi dalam pengelolaan sumber daya laut, meskipun dalam praktiknya nelayan juga menggunakan alat tangkap lain seperti jaring (*gill net*) dan tali rawai (untuk penangkapan hiu). Di Adijaya dan Nusa Ulan, ditemukan beberapa nelayan yang juga memanfaatkan hasil laut lain seperti sirip hiu, teripang, dan kerang-kerangan yang biasanya dijemur sebelum dijual. Sementara itu, di Kambala variasi alat tangkap dan jenis hasil tangkapan lebih beragam, karena nelayan menyesuaikan teknik penangkapan dengan jenis sumber daya yang ditargetkan, seperti kepiting bakau, ikan lema, ikan demersal, ikan pelagis, serta teripang dan tiram atau kerang mutiara, yang sebagian diperdagangkan melalui pengepul lokal di kampung. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan di wilayah KKP Kaimana masih didominasi oleh teknik sederhana, namun tetap berkembang secara adaptif sesuai dengan ketersediaan sumber daya, permintaan pasar, dan praktik pengelolaan adat yang berlaku di masyarakat.

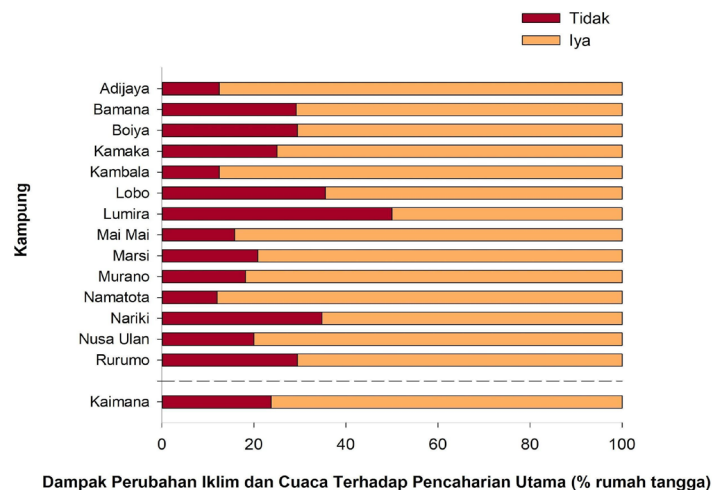


Gambar 17. Status dan Tren Teknik Pancing yang Digunakan Rumah Tangga

Perbandingan data antar tahun pemantauan menunjukkan bahwa teknik penangkapan ikan di wilayah KKP Kaimana secara konsisten didominasi oleh alat tangkap sederhana seperti pancing dasar (nelon dan kail), kalawai/tombak dan menggunakan tangan (area pasang surut atau bameti). Pada tahun 2012, penggunaan alat tangkap sederhana tercatat sekitar 78,44%, kemudian menurun pada 2014 (66,08%) ketika penggunaan alat tangkap pasif seperti jaring insang (*gill net*) meningkat hingga sekitar 26,15%. Pada periode 2016 dan 2019, penggunaan alat tangkap sederhana kembali meningkat menjadi sekitar 83,20% dan 78,89%, menunjukkan bahwa teknik sederhana tetap menjadi metode utama yang digunakan nelayan. Pada tahun 2025, proporsi penggunaan alat tangkap sederhana meningkat lebih tinggi lagi hingga mencapai sekitar 91,93%, sementara penggunaan alat tangkap lain seperti jaring insang (4,97%), rawai atau pancing statis (2,48%), dan jaring aktif seperti pukot tarik (0,62%) relatif kecil. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan di wilayah KKP Kaimana masih didominasi oleh teknik penangkapan tradisional berskala kecil. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi penangkapan, karakteristik sumber daya ikan lokal, praktik penangkapan yang menyesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga dan kondisi perairan setempat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan yang turut didorong oleh sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah maupun lembaga konservasi.

Status: Iklim dan Cuaca

Secara umum, sebagian besar rumah tangga di wilayah KKP Kaimana melaporkan bahwa perubahan iklim dan kondisi cuaca berdampak terhadap mata pencaharian utama mereka. Secara umum, sekitar 71% rumah tangga di tingkat kawasan menyatakan bahwa perubahan kondisi cuaca mempengaruhi aktivitas ekonomi mereka, terutama yang berkaitan dengan kegiatan melaut dan akses terhadap sumber daya alam. Proporsi rumah tangga yang merasakan dampak cukup tinggi di beberapa kampung seperti Kambala (95%), Nariki (93,33%), Nusa Ulan (91,67%), dan Rurumo (83,33%). Sementara itu, di beberapa kampung lain seperti Namatota (42,86%) dan Kamaka (41,67%), proporsi rumah tangga yang melaporkan dampak relatif lebih rendah, dan di Lumira seluruh responden menyatakan tidak merasakan dampak terhadap mata pencaharian utama mereka. Masyarakat umumnya mengaitkan dampak tersebut dengan perubahan musim dan cuaca yang semakin sulit diprediksi, yang mempengaruhi waktu melaut, hasil tangkapan, serta aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini terutama dirasakan oleh masyarakat di kampung seperti Nusa Ulan, Adijaya, dan Kambala, yang memiliki jarak cukup jauh dari pasar utama sehingga perubahan cuaca dapat menghambat aktivitas penangkapan maupun pemasaran hasil laut. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian kondisi iklim dan cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas mata pencaharian rumah tangga di wilayah KKP Kaimana.



Gambar 18. Dampak Perubahan Iklim dan Cuaca terhadap Pencaharian Utama (% rumah tangga)

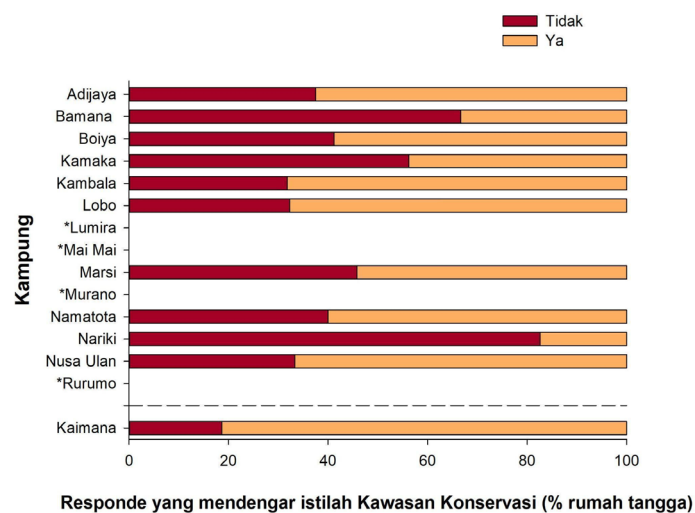
Untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan cuaca terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir, beberapa upaya mitigasi dini dapat dilakukan. Salah satunya adalah penguatan akses informasi cuaca dan musim agar nelayan dapat merencanakan waktu melaut dengan lebih aman. Selain itu, diversifikasi sumber mata pencaharian, seperti mengombinasikan kegiatan melaut dengan pertanian atau usaha kecil lainnya, dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Upaya lain yang penting adalah penyediaan infrastruktur yang ramah iklim, misalnya melalui restorasi mangrove dan terumbu karang pada area yang rusak, serta pembangunan tanggul laut atau pemecah gelombang

pada wilayah yang rentan terhadap gelombang dan abrasi. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Status: Kesadaran akan Peraturan Pelestarian Laut

Pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan serta keberlanjutan sumber daya laut. Tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana aturan pengelolaan dipahami, diterima, dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, pemantauan sosial ekonomi juga mengkaji beberapa aspek terkait pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi, termasuk pengenalan istilah kawasan konservasi, pengetahuan mengenai peraturan penangkapan ikan, serta persepsi masyarakat tentang pengertian dan aturan penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi. Selain itu, survei juga mengevaluasi persepsi masyarakat mengenai letak kampung mereka dalam kawasan konservasi. Informasi ini penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami keberadaan dan fungsi kawasan konservasi di wilayah mereka, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan sosialisasi atau peningkatan pemahaman masyarakat di masa mendatang.

Pengenalan Istilah Kawasan Konservasi

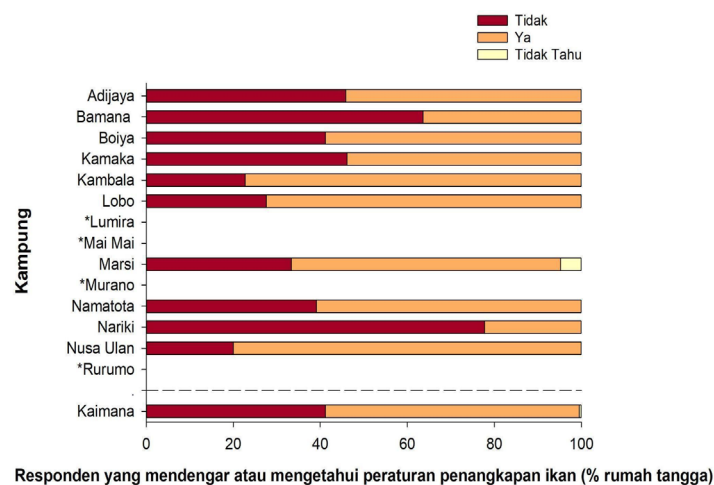


Gambar 19. Persentase Responden yang Mendengar Istilah Kawasan Konservasi

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, sebagian besar responden di wilayah KKP Kaimana menyatakan telah mendengar istilah Kawasan Konservasi, dengan proporsi sekitar 81,36% rumah tangga di tingkat kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dasar masyarakat terhadap konsep kawasan konservasi relatif cukup baik. Variasi antar

kampung masih terlihat, di mana beberapa kampung seperti Kambala (68,18%), Lobo (67,74%), Nusa Ulan (66,67%), dan Adijaya (62,50%) memiliki proporsi responden yang lebih tinggi yang menyatakan telah mendengar istilah tersebut. Sebaliknya, di beberapa kampung lain seperti Nariki (17,39%), Bamana (33,33%), dan Kamaka (43,75%), tingkat pengetahuan responden masih relatif lebih rendah. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Di wilayah KKP Kaimana, beberapa lembaga seperti Konservasi Indonesia, BLUD UPTD Kaimana–Fakfak, dan Perkumpulan Sinara memiliki wilayah kerja dan kegiatan patroli yang turut meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan laut. Selain itu, keterlibatan tenaga lokal yang direkrut dalam kegiatan patroli dan sosialisasi konservasi juga berperan dalam memperkuat penyebaran informasi tentang kawasan konservasi di tingkat kampung.

Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan

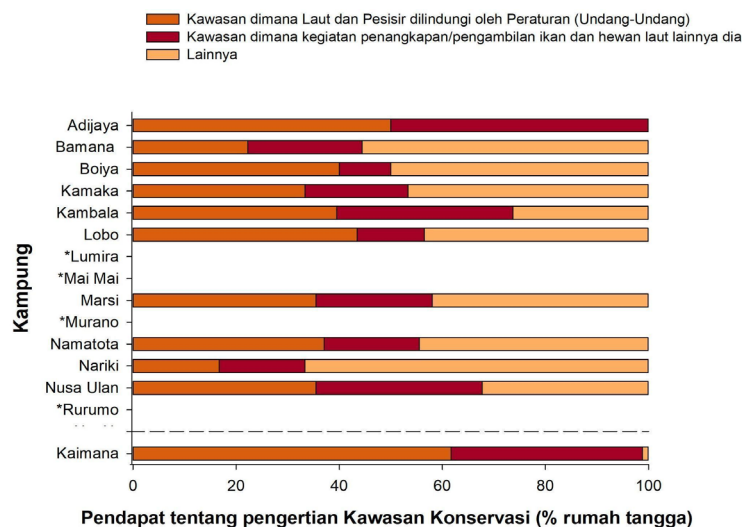


Gambar 20. Persentase Responden yang Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan

Hasil analisis data tahun 2025 memperlihatkan bahwa sekitar 58% responden di wilayah KKP Kaimana menyatakan telah mendengar atau mengetahui peraturan terkait penangkapan ikan, sementara sekitar 41% responden menyatakan belum mengetahui peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap regulasi penangkapan ikan di tingkat kawasan masih berada pada tingkat menengah. Variasi antar kampung terlihat cukup jelas, di mana beberapa kampung seperti Nusa Ulan (80%), Kambala (77,27%), Lobo (72,41%), dan Namatota (60,87%) memiliki proporsi responden yang lebih tinggi yang mengetahui adanya peraturan penangkapan ikan. Sebaliknya, di kampung seperti Nariki (22,22%) dan Bamana (36,36%), sebagian besar responden masih belum mengetahui peraturan tersebut. Selain peraturan formal, masyarakat di wilayah KKP Kaimana juga mengenal pengaturan wilayah penangkapan berdasarkan sistem petuanan atau hak ulayat, di mana setiap wilayah laut memiliki pemilik atau pengelola adat tertentu. Dalam praktiknya,

masyarakat umumnya mengetahui batas-batas wilayah penangkapan dan kepada siapa mereka harus melapor atau meminta izin, biasanya kepada marga atau klan pemilik wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut di wilayah KKP Kaimana tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga oleh sistem kelembagaan adat yang masih kuat dalam mengatur akses dan pemanfaatan sumber daya laut.

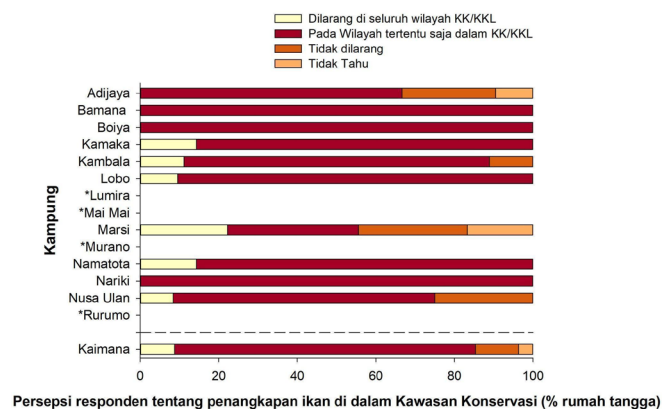
Pendapat tentang Pengertian Kawasan Konservasi



Gambar 21. Persentase Responden tentang Pengertian Kawasan Konservasi

Secara keseluruhan, sebagian besar responden di wilayah KKP Kaimana memahami bahwa kawasan konservasi merupakan wilayah laut dan pesisir yang dilindungi oleh peraturan atau undang-undang, dengan proporsi sekitar 61,68% rumah tangga di tingkat kawasan. Selain itu, sekitar 37,13% responden memaknai kawasan konservasi sebagai wilayah di mana kegiatan penangkapan atau pengambilan ikan dan biota laut lainnya diatur atau dibatasi. Hanya sebagian kecil responden (sekitar 1,2%) yang memberikan jawaban lain terkait pengertian kawasan konservasi. Variasi antar kampung masih terlihat, di mana kampung seperti Adijaya (50%), Lobo (43,48%), Boiya (40%), dan Kambala (39,47%) memiliki proporsi responden yang cukup besar yang memahami kawasan konservasi sebagai wilayah yang dilindungi oleh peraturan. Sementara itu, di beberapa kampung lain seperti Nariki (66,67%), Bamana (55,56%), dan Namatota (44,44%), responden lebih banyak memberikan penjelasan lain terkait pengertian kawasan konservasi. Perbedaan pemahaman ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat akses informasi, pengalaman masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan kawasan, serta intensitas sosialisasi mengenai konservasi laut di masing-masing kampung. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah KKP Kaimana telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep kawasan konservasi, meskipun interpretasi terhadap makna dan tujuan kawasan tersebut masih bervariasi antar kampung.

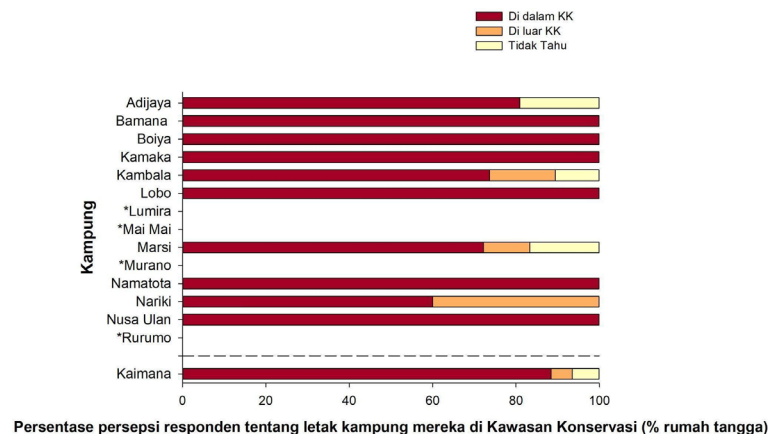
Pendapat tentang Penangkapan Ikan di KKP



Gambar 22. Persentase Persepsi Responden tentang Penangkapan Ikan di Dalam Kawasan Konservasi

Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan sebagian besar responden di wilayah KKP Kaimana berpendapat bahwa kegiatan penangkapan ikan masih diperbolehkan pada wilayah tertentu di dalam kawasan konservasi, dengan proporsi sekitar 76,64% rumah tangga di tingkat kawasan. Sebagian kecil responden (8,76%) berpendapat bahwa penangkapan ikan dilarang di seluruh wilayah kawasan konservasi, sementara sekitar 10,95% menyatakan bahwa penangkapan ikan tidak dilarang, dan sekitar 3,65% responden tidak mengetahui aturan tersebut. Variasi persepsi antar kampung juga terlihat, misalnya di Nariki, Boiya, dan Bamana, seluruh responden menyatakan bahwa penangkapan ikan hanya diperbolehkan pada wilayah tertentu dalam kawasan konservasi. Sementara itu, di kampung seperti Marsi dan Nusa Ulan, sebagian responden menyatakan bahwa penangkapan ikan masih dapat dilakukan secara lebih luas atau belum sepenuhnya dibatasi. Perbedaan persepsi ini berkaitan dengan praktik pengelolaan wilayah laut yang masih dipengaruhi oleh sistem petuanan atau hak ulayat, di mana wilayah penangkapan diatur berdasarkan batas wilayah adat antar kampung maupun marga. Dalam praktiknya, beberapa responden menyampaikan bahwa mereka masih dapat memancing di berbagai lokasi karena belum terdapat larangan yang secara jelas membatasi kegiatan memancing di seluruh area, meskipun mereka tetap memahami adanya batas wilayah perairan yang diatur secara adat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai aturan penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi masih dipengaruhi oleh kombinasi antara aturan formal kawasan konservasi dan sistem pengelolaan laut berbasis adat yang berlaku di masyarakat.

Letak Kampung di KKP



Gambar 23. Persentase Persepsi Responden tentang Letak Kampung di Kawasan Konservasi

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, sebagian besar responden di wilayah KKP Kaimana memahami bahwa kampung mereka berada di dalam kawasan konservasi, dengan proporsi sekitar 88,41% rumah tangga di tingkat kawasan. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa kampung mereka berada di luar kawasan konservasi (5,07%) atau tidak mengetahui (6,52%). Pada tingkat kampung, pemahaman ini terlihat cukup kuat di beberapa lokasi seperti Nusa Ulan, Namatota, Lobo, Kamaka, Boiya, dan Bamana, di mana seluruh responden menyatakan bahwa kampung mereka berada di dalam kawasan konservasi. Sementara itu, di kampung seperti Kambala dan Marsi, masih terdapat sebagian responden yang beranggapan bahwa kampung mereka berada di luar kawasan atau belum mengetahui secara pasti status wilayah tersebut. Perbedaan pemahaman ini dapat dipengaruhi oleh tingkat akses informasi serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan. Secara umum, tingginya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai letak kampung mereka dalam kawasan konservasi juga berkaitan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola kawasan (BLUD UPTD Kaimana–Fakfak) serta beberapa lembaga swadaya masyarakat, yang secara rutin melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat di tingkat kampung. Upaya tersebut berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi kawasan konservasi di wilayah mereka.

Bagian III

Rekomendasi Kebijakan



Rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan sosial ekonomi di KKP Kaimana selama periode 2012 sampai 2025. Tujuannya adalah memberikan arah kebijakan yang selaras dengan prinsip konservasi berkelanjutan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

1. Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Temuan pemantauan menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga masih berada pada kondisi tidak tahan pangan tanpa kelaparan, serta terdapat peningkatan kerentanan pangan pada anak di beberapa kampung. Oleh karena itu, diperlukan program penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas, seperti pengembangan kebun pangan rumah tangga, diversifikasi sumber pangan lokal, serta peningkatan akses distribusi bahan pangan ke kampung-kampung yang memiliki keterbatasan akses pasar.

2. Penguatan Ekonomi Rumah Tangga dan Diversifikasi Mata Pencaharian

Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian dan perikanan masih cukup tinggi, sementara indeks kepemilikan aset rumah tangga menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan pembangunan di wilayah KKP Kaimana perlu mendorong diversifikasi sumber penghidupan melalui pengembangan usaha ekonomi lokal, peningkatan nilai tambah produk perikanan dan pertanian, serta penguatan akses masyarakat terhadap pasar dan jaringan perdagangan.

3. Peningkatan Akses Infrastruktur dan Konektivitas Pasar

Perbedaan waktu tempuh menuju pasar antar kampung masih cukup besar dan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memasarkan hasil laut atau produksi pertanian. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur transportasi laut, pengembangan pasar lokal di tingkat kampung, serta dukungan logistik untuk distribusi hasil tangkapan dan produk pertanian menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi masyarakat pesisir.

4. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat

Sistem petuanan atau hak ulayat yang masih kuat dalam masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan laut berbasis adat memiliki peran penting dalam tata kelola sumber daya laut. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perlu memperkuat integrasi antara sistem pengelolaan formal kawasan konservasi dengan kelembagaan adat lokal, sehingga pengelolaan sumber daya laut dapat berlangsung secara lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

5. Peningkatan Kesadaran dan Sosialisasi Kawasan Konservasi

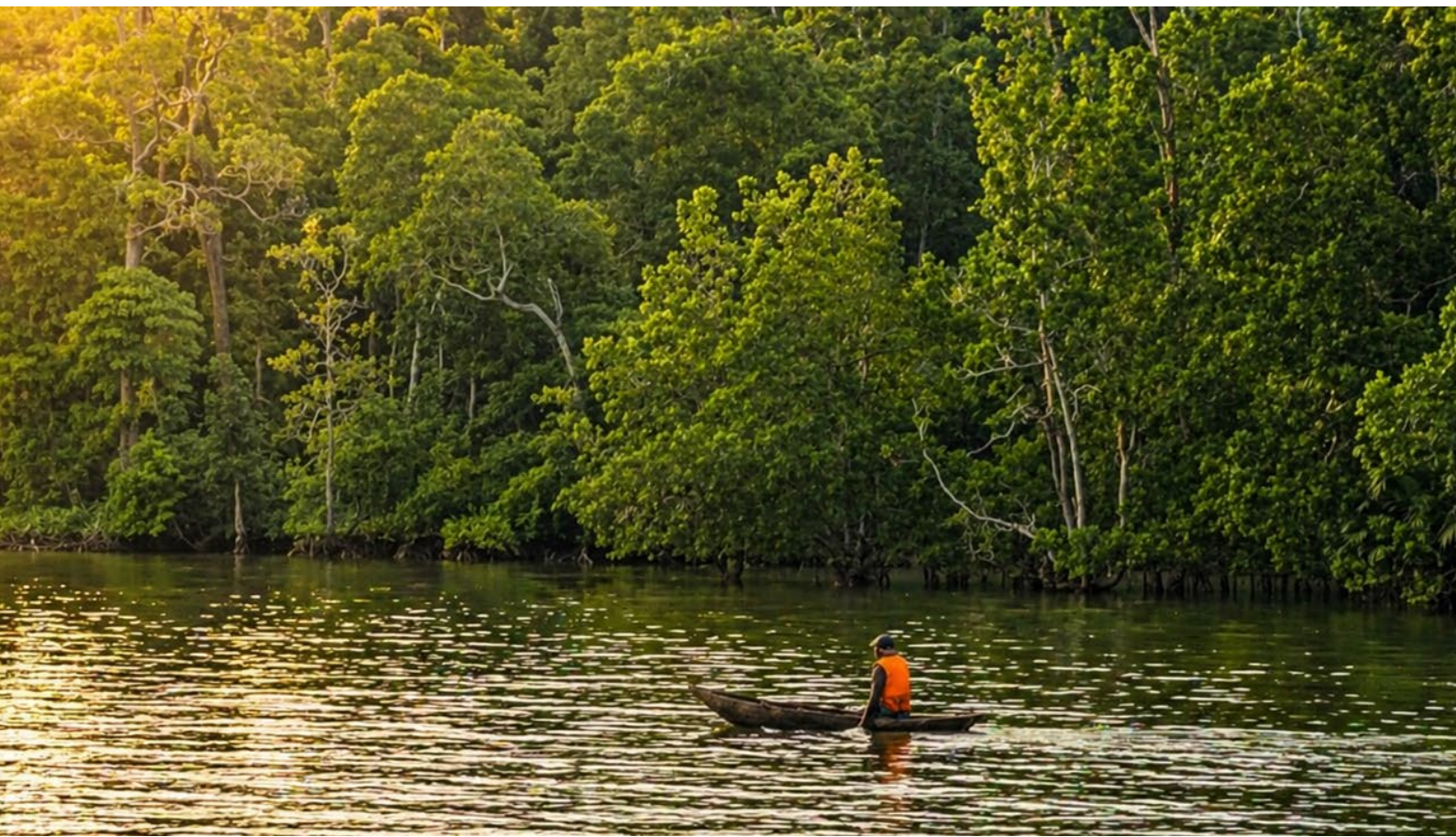
Meskipun sebagian besar masyarakat telah mengenal istilah kawasan konservasi, tingkat pengetahuan mengenai peraturan penangkapan ikan masih berada pada tingkat menengah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pendidikan konservasi perlu terus diperkuat melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah kampung, tokoh adat, serta kelompok nelayan atau masyarakat.

6. Penguatan Adaptasi Perubahan Iklim bagi Masyarakat Pesisir

Sebagian besar rumah tangga melaporkan bahwa perubahan iklim dan kondisi cuaca mempengaruhi aktivitas ekonomi mereka, terutama kegiatan melaut. Oleh karena itu, strategi adaptasi perubahan iklim perlu menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan kawasan, antara lain melalui peningkatan akses informasi cuaca bagi nelayan, diversifikasi mata pencaharian, serta pembangunan infrastruktur pesisir yang ramah iklim seperti restorasi mangrove, rehabilitasi terumbu karang, dan perlindungan pantai dari abrasi.

Bagi masyarakat di wilayah KKP Kaimana, laut bukan hanya sumber ekonomi dan pangan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Karena itu, pengelolaan dan perlindungan laut menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

(Foto: Arnoldus Ananta/LPPM UNIPA)



DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G. R., & Erdmann, M. V. (2009). *Reef fishes of the Bird's Head Peninsula, Papua, Indonesia*. Check List, 5(3), 587–628. <https://doi.org/10.15560/5.3.587>
- Allen, G. R., & Erdmann, M. V. (2012). *Reef fishes of the East Indies* (Vols. 1–3). Perth, Australia: University of Hawai'i Press.
- Allen, G. R., Erdmann, M. V., & Munday, P. L. (2003). *Reef fishes of the Bird's Head Peninsula, West Papua, Indonesia*. *Aquarium Sciences and Conservation*, 5(1), 1–28. <https://doi.org/10.1023/A:1025337819823>
- Bickel, G., Nord, M., Price, C., Hamilton, W., & Cook, J. (2000). *Guide to Measuring Household Food Security, Revised 2000*. Alexandria, VA: U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. (<https://www.fns.usda.gov/guide-measuring-household-food-security-revised-2000>)
- Casey, P. H., Szeto, K. L., Robbins, J. M., Stuff, J. E., Connell, C., Gossett, J. M., & Simpson, P. M. (2005). Child health-related quality of life and household food security. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 159(1), 51–56. <https://doi.org/10.1001/archpedi.159.1.51>
- Cinner, J. E. (2005). Socioeconomic factors influencing customary marine tenure in the Indo-Pacific. *Ecology and Society*, 10(1), 36. <https://doi.org/10.5751/ES-01230-100136>
- Conservation International. (2021). *Bird's Head Seascape: A Global Priority for Marine Conservation*. Retrieved from <https://www.conservation.org/>
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2017). *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Konservasi Kaimana Tahun 2018–2027*. Jakarta: KLHK.
- Erdmann, M. V., & Allen, G. R. (2009). *A rapid marine biodiversity assessment of the Bird's Head Seascape, West Papua, Indonesia*. RAP Bulletin of Biological Assessment No. 20. Arlington, VA: Conservation International.
- Glew, L., M.B. Mascia and F. Pakiding. (2012). Solving the Mystery of MPA Performance: monitoring social impacts. Field Manual (version 1.0). World Wildlife Fund and Universitas Negeri Papua, Washington D.C. and Manokwari, Indonesia.
- Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2015. *Ethnologue: Languages of the World*, Eighteenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online: <http://www.ethnologue.com>.
- Martorell, R. (1995). Results and implications of the INCAP follow-up study. *Journal of Nutrition*, 125(4 Suppl), 1127S–1138S. https://doi.org/10.1093/jn/125.suppl_4.1127S
- United Nations Development Programme (UNDP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, & Commission of the European Communities. (1990). *Guidelines for Programme Design, Monitoring and Evaluation*. OECD/DAC Expert Group on Aid Evaluation.
- Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. *Forest Science*, 49(6), 830–840.

